



**Pemerintah
Kabupaten Pangandaran**



LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KABUPATEN PANGANDARAN**

2023

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 dapat selesai dengan baik dan lancar sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran.



Teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan sebagai perbaikan demi peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKjIP ini, dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang lebih sejahtera.

Pangandaran, 26 Maret 2024
BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran.....	4
1.3.1 Letak Geografis Wilayah.....	4
1.3.2 Kondisi Demografi.....	14
1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran.....	18
1.4.1 Kewenangan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.....	20
1.4.2 Sumber daya Apratur Sipil Negara (ASN).....	21
1.4.3 Sumber daya Keuangan.....	22
1.5 Isu Strategis.....	27
1.6 Landasan Hukum.....	32
1.7 Sistematika Penyusunan LKJiP.....	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	34
2.1 Perencanaan Strategis.....	34
2.1.1 Visi.....	36
2.1.2 Misi.....	37
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	40
2.1.4 Strategis dan Arah Kebijakan.....	47
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	50
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	53
2.4 Perjanjian Kinerja.....	53

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	56
3.1 Pengukuran Kinerja.....	57
3.2 Capaian Kinerja 2023.....	58
3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	61
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023.....	90
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD.....	93
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional.....	95
3.2.5 Realisasi Anggaran.....	96
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran.....	99
BAB IV PENUTUP.....	100
4.1 PENUTUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran..... 5

Tabel 1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran..... 6

Tabel 1.3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran..... 7

Tabel 1.4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran..... 11

Tabel 1.5 DAS di Kabupaten Pangandaran..... 12

Tabel 1.6 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Pangandaran..... 15

Tabel 1.7 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran..... 15

Tabel 1.8 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran..... 16

Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Menurut tingkat Pendiikan di Kabupaten Pangandaran..... 17

Tabel 1.10 Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Tingkat Golongan..... 22

Tabel 1.11 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran 2019-2023..... 22

Tabel 1.12 Proyeksi Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023..... 25

Tabel 1.13 Detil Proyeksi Kebutuhan Anggaran untuk Belanja Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2023..... 26

Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasannya..... 35

Tabel 2.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025..... 39

Tabel 2.3 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran..... 43

Tabel 2.4 Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran 47

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026..... 50

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran..... 51

Tabel 2.7 Indikator Sasaran (*Impact*) Tahun 2022-2026 Pemerintah Kabupaten Pangandaran..... 51

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2023..... 54

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja..... 58

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2023 58

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tujuan 1..... 61

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1..... 61

Tabel 3.5 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis..... 62

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2..... 63

Tabel 3.7 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 2..... 64

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tujuan 2..... 65

Tabel 3.9 Capaian kinerja sasaran strategis 3..... 65

Tabel 3.10 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran 3..... 66

Tabel 3.11 capaian Kinerja Tujuan 3..... 67

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4..... 68

Tabel 3.13 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Stategis 4..... 69

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5..... 70

Tabel 3.15 Penyerapan Anggaran Program Penunjang sasaran strategis 5..... 71

Tabel 3.16 Capaian kinerja sasaran strategis 6..... 71

Tabel 3.17 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 6..... 72

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7..... 73

Tabel 3.19 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 7..... 73

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Tujuan strategis 4..... 74

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran strategis 8..... 74

Tabel 3.22 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 8..... 75

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaraan strategis 9..... 77

Tabel 3.24 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 9..... 78

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10..... 78

Tabel 3.26 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 10..... 79

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11..... 80

Tabel 3.28 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 11..... 81

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Tujuan 7..... 82

Tabel 3.30 Capaian Kinerja Sasaran strategis 12..... 82

Tabel 3.31 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 12... 82

Tabel 3.32 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13..... 83

Tabel 3.33 Penyerapan Program Penunjang Sasaran Strategis 13..... 84

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Tujuan 6..... 85

Tabel 3.35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14..... 85

Tabel 3.36 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 14... 86

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15..... 87

Tabel 3.38 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 15.... 87

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16..... 88

Tabel 3.40 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 16.... 89

Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2022..... 90

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan target Akhir RPJMD..... 93

Tabel 3.43 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Provinsi/ Standar Nasional..... 95

Tabel 3.44 Capaian Anggaran Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023.... 97

Tabel 3.45 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023..... 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Orientasi Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat.....	4
Gambar 1.2 Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran.....	6
Gambar 1.3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran.....	9
Gambar 1.4 Kelas Lereng Kabupaten Pangandaran.....	10
Gambar 1.5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran.....	11
Gambar 1.6 Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran.....	13
Gambar 1.7 Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran.....	14
Gambar 1.8 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD.....	23
Gambar 1.9 Proyeksi Pengeluaran Kabupaten Pangandaran.....	24
Gambar 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	69
Gambar 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2.....	71
Gambar 3.3 Capaiankinerja Sasaran Strategis 3.....	73
Gambar 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.....	76
Gambar 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.....	79
Gambar 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.....	80
Gambar 3.7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.....	82
Gambar 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.....	85
Gambar 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.....	87
Gambar 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10.....	89
Gambar 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11.....	91
Gambar 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13.....	95
Gambar 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14.....	97
Gambar 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15.....	99
Gambar 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterbitkan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan SAKIP. Pemerintah wajib melaksanakan penyelenggaraan yang efektif, efisien, dan akuntabel baik skala pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, di satu sisi mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan dapat menunjang pelaksanaannya. Sistem tersebut dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kandungan SAKIP mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Tujuannya adalah Pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan pelayanan publik yang baik serta berkualitas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai upaya mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang berupa laporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas tersebut disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan pemerintah daerah. Laporan ini berisi mengenai pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media

pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan LKjIP Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan gambaran terkait pencapaian kinerja dalam tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Pangandaran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja. LKjIP Kabupaten Pangandaran disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pangandaran tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini:

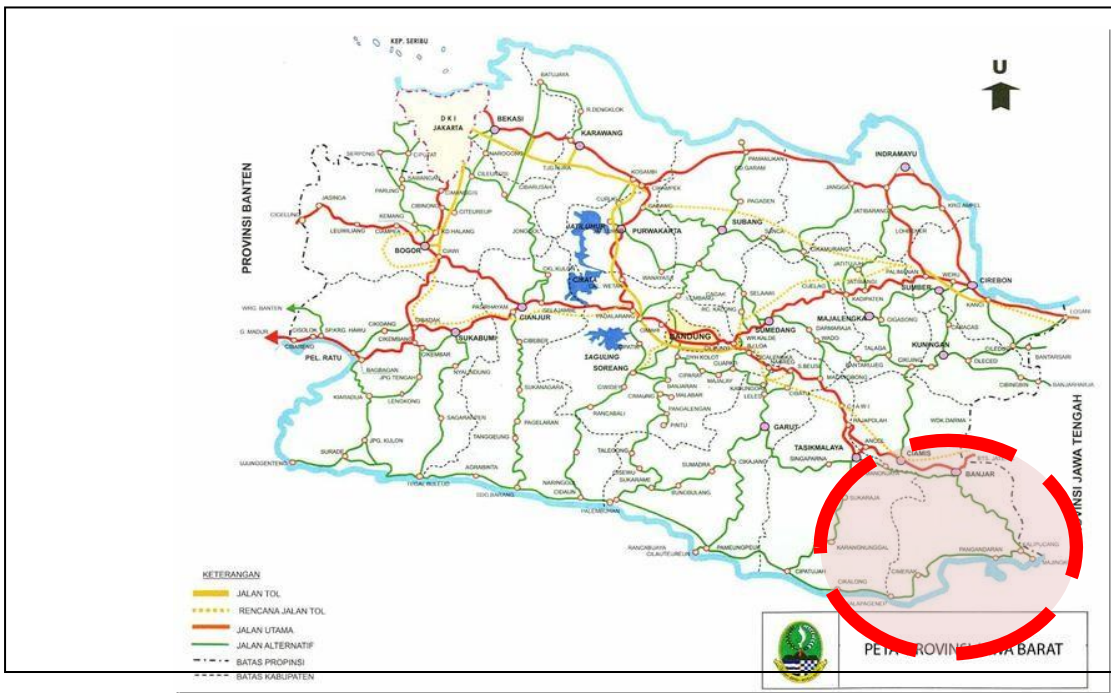
- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Pangandaran atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama satu tahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2023.
- 2. Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat merumuskan strategi pemecahan masalah

sehingga capaian kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

1.3.1 Letak Geografis Wilayah

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah tepatnya dengan Kabupaten Cilacap.



Gambar 1. 1 Orientasi Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, tahun 2010

Kabupaten Pangandaran memiliki ibukota kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Parigi
- b. Kecamatan Cijulang
- c. Kecamatan Cimerak
- d. Kecamatan Cigugur
- e. Kecamatan Langkaplancar
- f. Kecamatan Mangunjaya;
- g. Kecamatan Padaherang;
- h. Kecamatan Kalipucang;
- i. Kecamatan Pangandaran; dan
- j. Kecamatan Sidamulih.

Luas Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km², dengan

distribusi luasan untuk masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

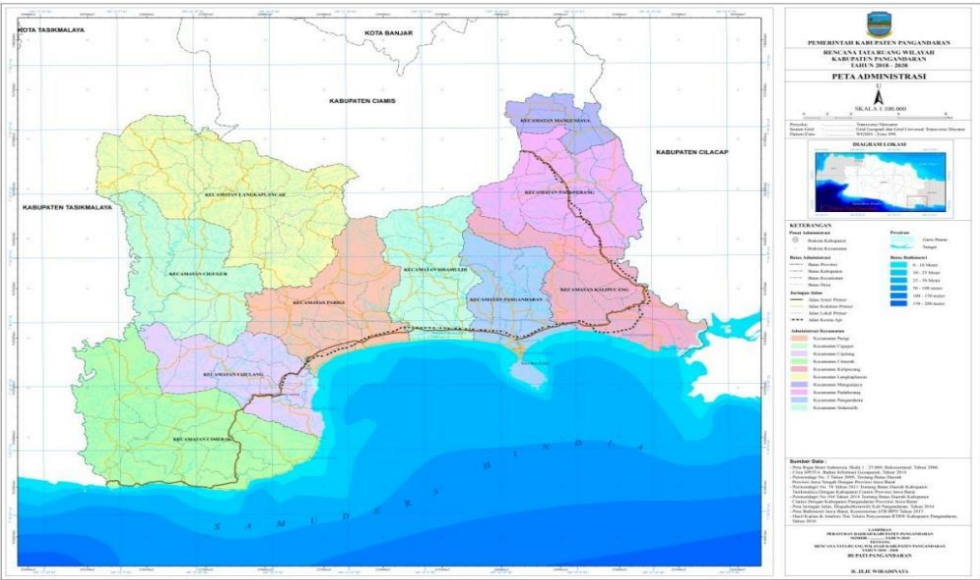
No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Cimerak	190,22	11	51	99	357
2	Cijulang	94,37	7	38	90	252
3	Cigugur	117,82	7	39	64	200
4	Langkaplancar	205,54	15	66	115	414
5	Parigi	111,23	10	53	122	399
6	Sidamulih	90.47	7	33	68	263
7	Pangandaran	75,57	8	33	90	344
8	Kalipucang	104,27	9	29	80	291
9	Padaherang	112,76	14	60	142	443
10	Mangunjaya	31,98	5	28	47	233
Jumlah		1.134,23	93	430	917	3.196

Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas kabupaten dan batas kecamatan.



Gambar 1. 2 Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran
Sumber: Perda Kabupaten Pangandaran Nomor3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038

1.3.1.1 Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 mdpl. Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi di dari selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebingcuram dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. • Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.
2	Cijulang	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.
3	Cigugur	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif samaantara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	• Wilayah ini bukan pesisir melainkan dataran tinggi. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relative sama antara 400-1.000 mdpl.
5	Parigi	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl • Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi,Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.
6	Sidamulih	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai.

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
		Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginyayakni desa Kersaratu dan Kalijati.
7	Pangandaran	- Merupakan daerah pesisir pantai,merupakan ODTWNasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi. - Ketinggian: 3-500 mdpl.
8	Kalipucang	- Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). - Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara2-8 mdpl.
9	Padaherang	- Wilayah ini bukan pesisir. - Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl. - Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). - Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang realtif sama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	- Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. - Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif samaantara 13-17 mdpl.

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Pangandaran memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawirsesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisimasing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

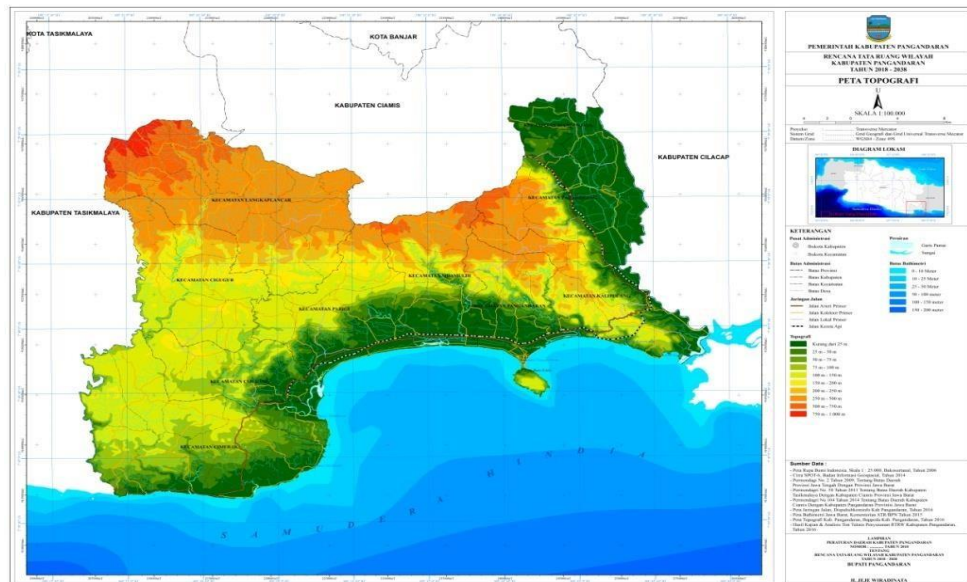
Tabel 1. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	Kemiringan lereng merata pada hampir semua desadengan Kemiringan lereng sekitar 5 % - 15 %.
2	Cijulang	- Kemiringan lereng merata pada hampir semua desadengan Kemiringan lereng sekitar 5 % - 15 %. - Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15 % - 25 %.
3	Cigugur	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.

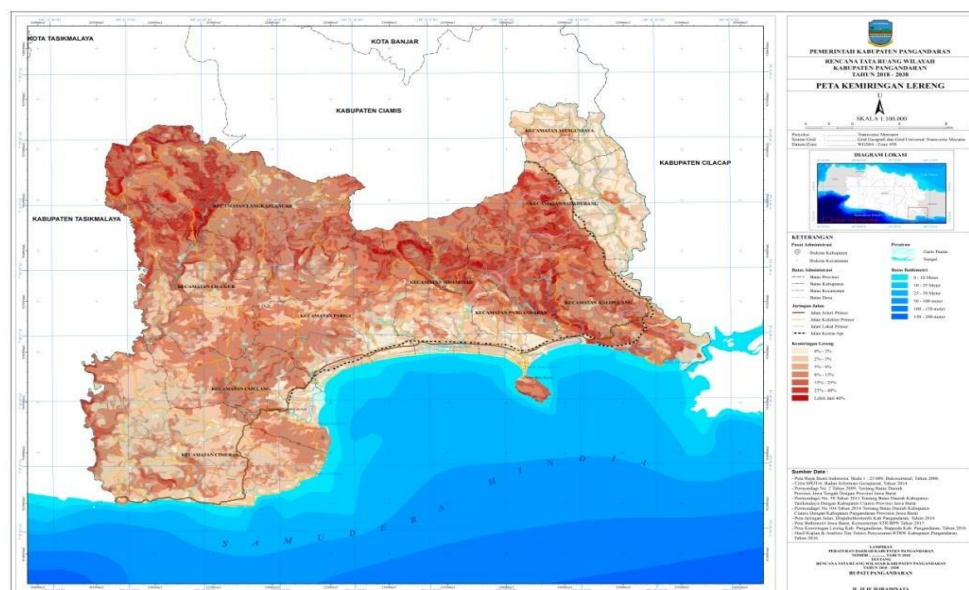
No	Kecamatan	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran
4	Langkaplancar	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.
5	Parigi	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.
6	Sidamulih	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2%-lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % • terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7	Pangandaran	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2%-lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.
8	Kalipucang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5%-lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggian.
9	Padaherang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 0%-40%. • Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0%-8%. • Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki • Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8%-lebih dari 40%.
10	Mangunjaya	• Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desadengan kisaran kemiringan lereng antara 0 %-5 %.

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dijaga karena berpotensi menimbulkan bencana apabila tidak dikelola dengan baik. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng pada Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran
 Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)



Gambar 1. 4 Kelas Lereng Kabupaten Pangandaran
 Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

1.3.1.2 Kondisi Geologi

Menurut kondisi geologinya, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah-timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat

dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

- a. **Satuan Geologi Lingkungan Dataran:** Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng $<5\%$. Ketinggian antara 0-50 m diatas permukaan air laut. Melampar di pesisir pantai antara Pangandaran-Parigi-Cijulang dan Kalipucang.
- b. **Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal:** Kemiringan lereng $>25\%$, ketinggian antara 100-700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Melampar dibagian tengah memanjang kearah Barat Daya-Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air.

1. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalicupang

- Tanah lapukan berupa lempung pasir-pasiran-kerikil, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang-tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka airtanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata airdebit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna airagak kekuningan.
- Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya hutan dan hutan lindung sebagai daerah resapan air dan sebagian baik untuk perkebunan tanaman keras per tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang- Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

2. Perbukitan Terjal Pananjung

- Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai objek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

- c. **Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping):** Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasir, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini melampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi hingga

Cimerak dan meluas ke Utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagaidaerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik.

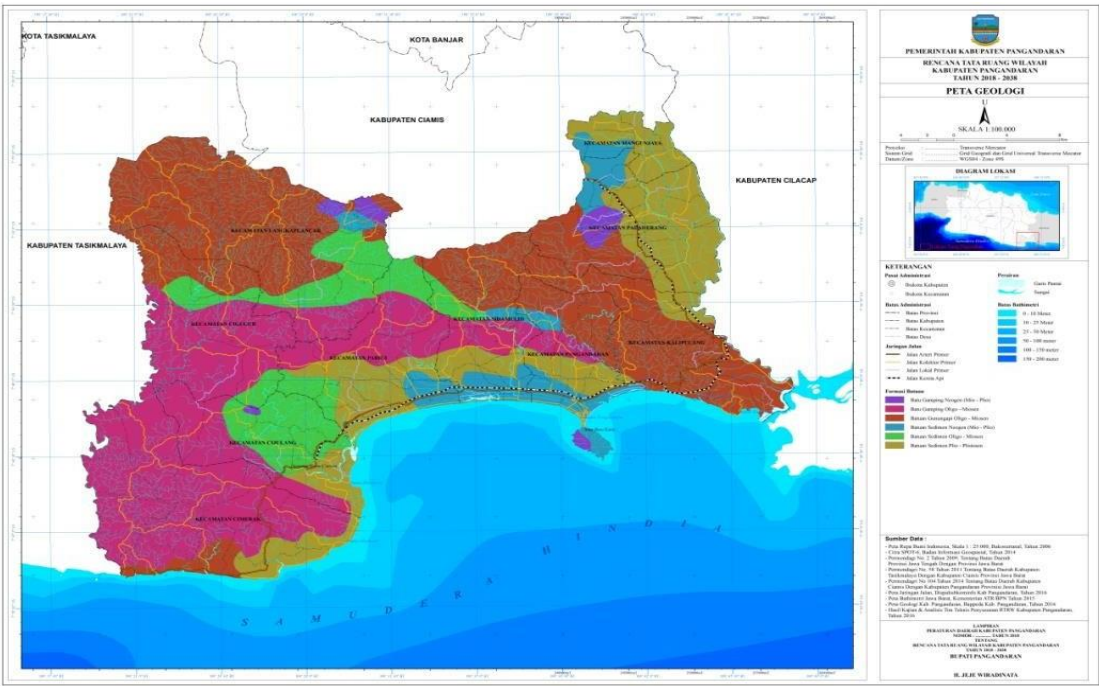
Tanah lapukan umumnya berupa lempung kerikilan yang sangat subur untuk pertanian lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang- tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi amblesan. Adapunjenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	1.649,77
2	Batu Gamping Oligo – Miosen	35.296,43
3	Batuan Gunungapi Oligo – Miosen	37.349,30
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	6.869,57
5	Batuan Sedimen Oligo – Miosen	11.800,95
6	Batuan Sedimen Plio – Plistosen	20.358,12
Grand Total		113.324,15

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Peta sebaran geologi di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

1.3.1.3 Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini

mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang.

Kabupaten Pangandaran berada dalam 2 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciwulan - Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yangtercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. 5 DAS di Kabupaten Pangandaran

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Ciwulan – Cilaki	91.250,39
2	DAS Citanduy	22.074,72
	Jumlah	113.325,11

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

- 1 Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, laba dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
- 2 Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10 ;V100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara2-9 m, pH berkisar antara 6-9 setempat menunjukkan angka yang cukup tinggi.Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksivulkanik. Debit mata air bervariasi diantara 0,2 l/detik hingga 20 l/detik bahkanada juga yang mencapai 100 l/detik. Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang danKecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemda yaitu:

1. Mata air Kalisodong Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guhahawu Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;

3. Mata air Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

Peta sebaran DAS di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. 6 Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran

Sumber : Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038)

1.3.1.4 Kondisi Klimatologi

Secara umum Kabupaten Pangandaran beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) dengan curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89% dengan suhu 20-30°C. Musim timur dan musim barat secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran.

Musim timur terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Pada saat musim timur angin bersifat kering, karena membawa massa udara kering yang berdampak terjadi musim kemarau. Angin musim timur bergerak dari Australia ke Asia.

Pada saat musim barat angin bertiup dari wilayah Asia kemudian melewati samudra Hindia menuju ke benua Australia. Pada kondisi ini, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan dan akan menyebabkan tekanan tinggi di kawasan Asia termasuk Indonesia, namun tekanan menjadi rendah di kawasan Australia. Peta sebaran curah hujan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

jiwa. Berikut ini gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2022.

Tabel 1. 6 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
		(KM ²)	(Jiwa)	(Jiwa)
1	PARIGI	111,23	47.768	429,45
2	CIJULANG	94,37	27.968	296,37
3	CIMERAK	190,22	50.333	264,60
4	CIGUGUR	117,82	23.426	198,83
5	LANGKAPLANCAR	205,54	52.457	255,22
6	MANGUNJAYA	31,98	33.573	1049,81
7	PADAHERANG	112,76	70.602	626,13
8	KALIPUCANG	104,27	39.483	376,66
9	PANGANDARAN	75,57	60.538	801,09
10	SIDAMULIH	90,47	30600	338,23
Jumlah		1.134,23	436.748	385,06

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (dependency ratio), hal tersebut dapat menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya angka komposisi penduduk di Kabupaten Pangandaran tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	14.786	13.846	28.632
2	5-9	16.307	15.240	31.547
3	10-14	17.571	16.404	33.294
4	15-19	14.281	14.013	28.294
5	20-24	17.684	16.760	34.444
6	25-29	17.288	16.165	33.453
7	30-34	15.550	14.700	30.250

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
8	35-39	14.734	14.530	29.264
9	40-44	14.858	15.284	30.142
10	45-49	14.520	15.792	30.312
11	50-54	15.284	16.182	31.466
12	55-59	13.141	14.587	27.728
13	60-64	11.672	12.368	24.040
14	65-69	8.703	8.551	17.254
15	70-74	6.020	5.952	11.972
16	75+	6.317	7.658	13.975
Jumlah		218.716	218.032	436.748

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran 2023)

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan (dependency ratio) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan pada segala bidang. Tabel di bawah ini menyajikan angka beban ketergantungan penduduk.

Tabel 1.8 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Usia Produktif	Usia Tidak Produktif		Dependency Rasio
		(15-64)	0-14	65+	
1	Laki-laki	149.012	48.664	21.040	46,78
2	Perempuan	150.381	45.490	22.161	44,99
Jumlah		299.393	94.154	43.201	45,88

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Tahun 2023)

Tampak angka beban tanggungan telah kurang dari 50%. Hal ini berarti telah memasuki periode bonus demografi. Bila bonus demografi dimanfaatkan secara baik maka akan membuka window of opportunity. Kesempatan untuk mempercepat roda ekonomi menjadi lebih besar karena berlimpah nya penduduk usia produktif. Namun, bila periode bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan maka bukan window of opportunity yang diperoleh tetapi yang ada bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas bisa jadi meningkat. Bonus demografi yang disertai pembangunan manusia akan memberi dampak besar bagi kemajuan daerah. Usia produktif secara bersama-sama menggerakkan roda ekonomi.

Hal ini dapat berdampak pada pengangguran berkurang dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada akhirnya, puncak bonus demografi dan produktivitas penduduk diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Tersedianya lapangan kerja akan mencegah sumber daya manusia berpendidikan tinggi mencari dan pindah ke Kabupaten lain. Semakin banyak sumber daya manusia berkualitas tinggal di daerahnya maka keberhasilan pembangunan manusia semakin kentara. Terkait dengan besarnya angka ketergantungan akan mengurangi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turun dan naiknya angka IPM.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) karena salah satu faktor dalam IPM yaitu Pendidikan, yang merupakan gabungan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Makin banyak jumlah penduduk yang bersekolah dan menamatkan pendidikannya maka akan mendongkrak nilai Indeks Pendidikan. Untuk lebih jelasnya kondisi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9 Jumlah Penduduk Menurut tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

No	STATUS PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Tidak/Blm Sekolah	57.993	54.206	112.199
2	Belum Tamat SD/Sederajat	14.313	12.725	27.038
3	Tamat SD/Sederajat	77.395	88.843	166.238
4	SLTP/Sederajat	34.747	33.200	67.947
5	SLTA/Sederajat	26.518	21.041	47.559
6	Diploma I/II	793	829	1.622
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.131	1.479	2.610
8	Diploma IV/Strata I	5.355	5.483	10.838
9	Strata-II	450	216	666
10	Strata-III	21	10	31
Jumlah		218.716	218.032	436.748

(Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang telah menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan strata 1 sebanyak 10.838 orang, tingkat Diploma I dan II sebesar 1.622 orang, SLTA/Sederajat sebesar 47.559 orang dan SLTP/Sederajat sebesar 67.947

orang. Hal tersebut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran mulai meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 112.199 orang yang terdiri dari penduduk usia belum sekolah (0-5 tahun) sebanyak 28.632 orang dan sisanya adalah penduduk usia sekolah sampai dengan usia dewasa namun belum mengenyam pendidikan. Dari capaian tersebut maka menghasilkan Indeks Pendidikan sebesar 60,41 pada tahun 2022. Angka dimaksud masih rendah apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan Kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat sehingga perlu ada program pemerintah daerah untuk mendongkrak angka Indeks Pendidikan Kabupaten Pangandaran terutama dari jenjang pendidikan non formal/ pendidikan kesetaraan.

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan bupati Pangandaran tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Komposisi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sekertaris Daerah merupakan Sekertariat Daerah Tipe B;
- b. Sekertaris DPRD merupakan Sekertariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
 3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Persampahan, Kawasan Permukiman, Sub Urusan Pertamanan, dan Pemakaman;
 11. Dinas Pertanian Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian;
 12. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Pangan;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan-Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
 14. Dinas Perhubungan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Tipe C melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
 16. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.
- e. Badan terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A, melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Urusan Bencana;
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Parigi dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Cijulang dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Cimerak dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Cigugur dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Langkaplancar dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Padaherang dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Kalipucang dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Pangandaran dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Sidamulih dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Mangunjaya dengan Tipe B.

1.4.1 Kewenangan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

- 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Perumahan
 - 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 6) Sosial
- b. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar yang meliputi:
- 1) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Pangan
 - 4) Lingkungan Hidup
 - 5) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 7) Perhubungan
 - 8) Komunikasi dan Informatika
 - 9) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 10) Penanaman Modal
 - 11) Kepemudaan dan Olahraga
 - 12) Kebudayaan dan Pariwisata
 - 13) Perpustakaan
- c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
- 1) Perikanan
 - 2) Pertanian
 - 3) Perdagangan

Di samping hal tersebut juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dilihat dari aspek Sumber daya aparatur (PNS), Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Kabupaten Pangandaran pada adalah sebanyak 3.332 orang. Jumlah tersebut terdiri atas Golongan I sebanyak 3 orang, golongan II sebanyak 543 orang, golongan III sebanyak 1.994 orang dan golongan IV sebanyak 792 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah PNS Daerah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan golongan dan Eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 10 Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I/d	3
2	II/a	6
3	II/b	8
4	II/c	364
5	II/d	165
6	III/a	590
7	III/b	524
8	III/c	340
9	III/d	540
10	IV/a	276
11	IV/b	460
12	IV/c	55
13	IV/d	1
Jumlah		3.332

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

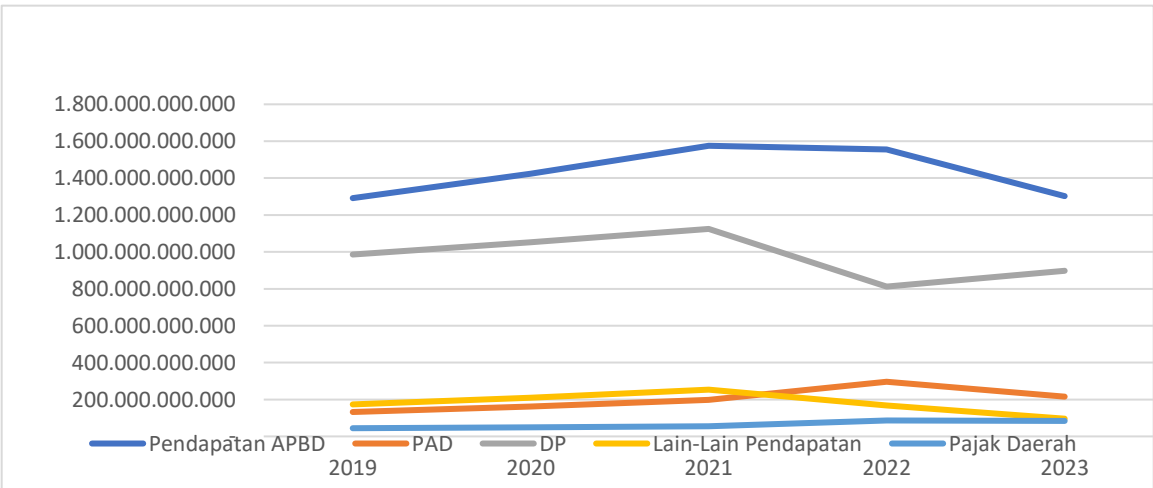
1.4.3 Sumber daya Keuangan

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang meliputi: anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan untuk masa satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil dari model-model proyeksi pendapatan yang dikembangkan pada dokumen RPJMD, maka didapatkan hasil proyeksi komponen pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran periode 2019 – 2023 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 11 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran 2019-2023

Tahun	Pendapatan APBD	PAD	DP	Lain-Lain Pendapatan	Pajak Daerah
2019	1,291,462,891,843	132,278,055,964	985,496,915,267	173,687,920,612	44,387,749,745
2020	1,423,106,520,432	161,568,904,551	1,051,748,795,769	209,788,820,113	49,580,038,462
2021	1,575,288,394,030	197,345,740,587	1,124,549,389,886	253,393,263,557	55,379,698,858
2022	1,554,673,675.520	296,136,212,846	812,058,811,727	168,270,766,196	86,225,000,000
2023	1,302,690,603,923	215,022,163,013	898,017,571,000	95,955,000,000	84,181,889,613

Gambar 1. 8 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran 2019-2023



Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata 10,2% di setiap tahunnya. Sementara dari tahun 2022 mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,10% sampai tahun 2023.

Pendapatan PAD Kabupaten Pangandaran terus mengalami peningkatan dari tahun 2019-2022. Berdasarkan Tabel 1.11 diatas menunjukkan kenaikan pendapatan PAD Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019-2021 sebesar 22,14% di setiap tahunnya. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 50,06% dari tahun sebelumnya. Tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,38%

Pendapatan PAD akan mempengaruhi besarnya pendapatan Dana Perimbangan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dari pemerintah pusat. Berdasarkan model regresi Dana Perimbangan didapatkan nilai pendapatan Dana Perimbangan di tahun 2019 sebesar Rp. 925.095.182.119 dan pendapatan Dana Perimbangan di tahun 2023 sebesar Rp. 898.017.571.000 dengan tingkat pertumbuhan pendapatan Dana Perimbangan sebesar 6,1 % hingga 27,79%.

Dengan menjumlahkan semua komponen PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, maka didapatkan total pendapatan APBD di tahun 2019 sebesar Rp. 1.291.462.891.843,00 dengan peningkatan pendapatan yang cukup konsisten, sehingga diperkirakan total pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran di tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.302.690.603.923,00.

Sementara itu Proyeksi Pengeluaran Daerah pada tahun 2019-2023 menggunakan asumsi bahwa rasio anggaran belanja terhadap penerimaan anggaran dan realisasi belanja terhadap anggaran memiliki kinerja

sebagaimana tahun 2014 hingga 2015, maka proyeksi anggaran belanja Kabupaten Pangandaran selama 5 tahun ke depan adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.9

Gambar 1. 9 Proyeksi Pengeluaran Kabupaten Pangandaran 2019-2023



Dengan membagi klasifikasi belanja berdasarkan jenis Belanja Langsung dan Tidak Langsung, maka proyeksi belanja secara detil dapat diilustrasikan dengan Tabel 1.12 berikut ini. Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2023, dalam kolom Belanja menembus angka lebih dari 1 trilyun rupiah. Kebutuhan belanja yang tinggi diantaranya adalah untuk alokasi belanja modal, yang besarnya sekitar 27,68% dari total anggaran belanja.

Tabel 1. 12 Proyeksi Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Uraian		2019	2020	2021	2022	2023
Belanja		1,304,111,589,877	1,332,879,857,778	1,362,312,454,938	1,895,098,261,143	1,765,209,967,458
Belanja Tidak Langsung		722,129,924,152	737,015,568,230	752,220,599,374		
1.1.	Belanja Pegawai	540,125,928,366	550,928,446,934	470,028,004,697	470,028,004,697	506,116,664,978
1.2.	Belanja Subsidi	7,758,361,700	7,991,112,551	-	-	-
1.3.	Belanja Bunga	-	-	10,470,585,500	10,470,585,500	13,600,000,000
1.4.	Belanja Hibah	6,339,648,809	6,561,536,517	29,479,355,500	29,479,355,500	35,639,951,524
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3,472,875,000	3,646,518,750	8,611,300,000	8,611,300,000	3,745,700,000
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	7,206,033,172	7,566,334,831	12,686,852,210 (5.4.01 Belanja Bagi Hasil)	12,686,852,210 (5.4.01 Belanja Bagi Hasil)	11,910,032,080 (5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan)
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	154,727,077,105	157,821,618,647	177,510,190,914 (5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan)	177,510,190,914 (5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan)	165,124,745,500
	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	287,197,000	287,197,000	5,500,000,000
Belanja Langsung		581,981,665,725	595,864,289,548	610,091,855,564		-
2.1.	Belanja Pegawai	30,205,811,163	31,111,985,498			-
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	194,093,239,778	199,916,036,971	661,614,805,679	661,614,805,679	630,931,643,065
2.3.	Belanja Modal	357,682,614,784	364,836,267,079	524,409,969,643	524,409,969,643	392,641,230,311

Dengan membagi anggaran belanja ke dalam empat pos utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanjatransfer diperoleh gambaran bahwa secara umum proyeksi belanja operasi akan memiliki kisaran porsi 88%. Di dalam belanja operasi tersebut, porsi belanja pegawai masih merupakan yang terbesar, yaitu sekitar 79% dari keseluruhan belanja operasi. Detail mengenai alokasi anggaran belanja tersebut ditampilkan pada Tabel 1.13:

Tabel 1. 13 Detil Proyeksi Kebutuhan Anggaran untuk Belanja Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Total Belanja	1,304,111,589,877.00	1,332,879,857,778.00	1,362,312,454,938.00	1,895,098,261,143	1,304,111,589,877,00
Belanja Operasi	936,722,941,921	957,977,255,868	979,734,810,944	1,180,204,051,376	936,722,941,921
Belanja Pegawai	570,331,739,529	582,040,432,432	593,992,360,935	470,028,004,697	570,331,739,529
Belanja Barang dan Jasa	194,093,239,778	199,916,036,971	205,913,518,080	661,614,805,679	194,093,239,778
Belanja Bunga	-	-	-	10,470,585,500	-
Belanja Subsidi	7,758,361,700	7,991,112,551	8,230,845,927	-	7,758,361,700
Belanja Hibah	6,339,648,809	6,561,536,517	6,791,190,295	29,479,355,500	6,339,648,809
Belanja Bantuan Sosial	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,687	8,611,300,000	3,472,875,000
Belanja Bantuan Keuangan	154,727,077,105	157,821,618,647	160,978,051,020	177,510,190,914	154,727,077,105
Belanja Modal	357,682,614,784	364,836,267,079	372,132,992,421	524,409,969,643	357,682,614,784
Belanja Tanah	-	-	-	80,000,000	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	164,432,697,755	-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	69,844,116,630	-
BelanjaJalanIrigasi dan Jaringan	-	-	-	286,128,292,193	-
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	2,000,000,000	-
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	287,197,000	2,500,000,000
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	287,197,000	2,500,000,000
Belanja Transfer	7,206,033,172	7,566,334,831	7,944,651,573	190,197,043,124	7,206,033,172
Belanja Bagi Hasil	7,206,033,172	7,566,334,831	7,944,651,573	12,686,852,210	7,206,033,172

1.5 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Beberapa isu strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 menggunakan analisis SWOT adalah:

1. Kekuatan

- a. Kabupaten Pangandaran memiliki Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang bervariasi.
- b. Garis pantai yang panjang yang bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama.
- c. Aktivitas pariwisata tersebar merata di seluruh kecamatan dan bisa menjadi *leading sector* karena memiliki keterkaitan ekonomi kebelakang maupun kedepan yang besar.
- d. Sektor Pariwisata dipercaya bisa *sustainable* karena bisa diterima oleh kondisi masyarakat dan sesuai dengan kondisi lingkungan.

2. Kelemahan

- a. Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi
- b. Kebijakan pembangunan di daerah belum terakomodasi dengan sempurna.
- c. Belum optimalnya Prasarana Transportasi Wilayah
- d. Masih terdapat kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan, yang menyebabkan aksesibilitas ke Sebagian wilayah dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan secara inklusif.
- e. SDM Kabupaten Pangandaran perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pembangunan yang efisien dan efektif serta berkelanjutan.
- f. Program kemitraan dengan masyarakat local masih kurang dilaksanakan dalam industry pariwisata.

3. Peluang

- a. Dalam RTRW Jabar, Pangandaran sebagai Kawasan Andalan Nasional dengan pertanian, industry, perkebunan, pariwisata dan perikanan, pariwisata sebagai sector unggulan.
- b. Pangandaran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Pusat Pertumbuhan jabar.
- c. Implementasi MEA memberikan peluang pasar di regional dan internasional yang tinggi terhadap DTW pangandaran.
- d. Adanya Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendorong aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pangandaran.
- e. Rencana Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 dan Kerjasama Perguruan Tinggi membuka peluang perubahan dari DTW menjadi Pusat Pariwisata.

4. Ancaman

- a. Globalisasi membuat produk impor mudah masuk, sementara aktivitas perekonomian masyarakat dirasa belum mampu untuk bersaing.
- b. Kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi bisa menyebabkan berubahnya nilai-nilai social budaya dan kearifan local masyarakat di Kabupaten Pangandaran.
- c. Kondisi geografi Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan akan bencana.
- d. DTW yang aktivitas pariwisatanya sudah berkembang berkorelasi dengan penurunan kualitas lingkungan di DTW tersebut, yang tidak menjamin keberlangsungan pembangunan wisata yang berkelanjutan.
- e. Ketidakstabilan perekonomian dunia memengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestic di Kabupaten Pangandaran.

Strategi SO ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan internal daerah agar dapat menarik keuntungan dari peluang eksternal yang mampu diambil oleh daerah. Strategi SO yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal diantaranya adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran mampu mewujudkan tingkat pelayanan yang lebih baik terkait dengan pengembangan sektor –sektor yang merupakan aktivitas kegiatan masyarakat terbesar, yaitu sektor pertanian, industri, perkebunan, pariwisata dan perikanan
2. Kondisi DTW yang ada, mampu menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang berskala internasional – sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional lain di Indonesia.
3. Mendorong kedewasaan dan kreatifitas ekonomi yang lebih besar, yang bisa dijadikan dasar untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian kabupaten secara berkesinambungan dimasa yang akan datang, karena memiliki keterkaitan yang erat baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan kebelakang.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran akan tercipta dengan adanya dukungan dan kerjasama yang lebih baik tidak hanya dengan masyarakat pangandaran akan tetapi dengan pemerintah regional maupun nasional, maupun kerjasama dengan kementerian dan perguruan tinggi – bahkan kerjasama dengan luar negeri.

Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal daerah dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang dapat diraihinya. Strategi WO yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal diantaranya adalah:

1. Agar dapat menangkap peluang sebagai daerah kawasan strategis pariwisata nasional dan juga sebagai daerah tujuan pariwisata skala internasional maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
2. Kemajuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan kepastian regulasi pengelolaan ruang dan lingkungan yang baik hingga ke tingkat yang lebih detail (zonasi). Oleh karenanya Pemerintah Daerah kabupaten Pangandaran harus segera membuat rencana ruang hingga ketinggian detail, agar mampu mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

3. Implementasi MEA bisa meningkatkan peluang Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia. Kondisi ini hanya akan mampu diwujudkan dengan adanya dukungan pembangunan sarana dan prasarana pendukung parawisata yang memadai dan juga pembangunan sumberdaya manusia yang sesuai dengan persyaratan daerah tujuanwisata kelas dunia.
4. Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan industri untuk mendorong aktivitas pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kemitraan antara industri pariwisata dengan masyarakat lokal

Strategi ST, bertujuan untuk menggunakan kekuatan yang ada di daerah untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal yang akan dihadapinya. Strategi ST yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal yang telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Semangat untuk melayani masyarakat akan bisa mewujudkan kabupaten Pangandaran sebagai tempat pariwisata yang responsif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi dan mampu menjaga lingkungan agar dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
2. Keistimewaan DTW Kabupaten Pangandaran, baik dari variasinya sebaran lokasi, maupun dukungan masyarakat nya, mampu dijadikan dasar untuk menjadi daya tarik wisatawan - baik asing maupun domestik - datang ke daerah ini meskipun pada kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil.
3. Sektor Pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran didukung tidak saja oleh keindahan alam tetapi juga oleh keistimewaan budaya masyarakatnya diyakini bisa mencegah degradasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.
4. Keterkaitan yang besar antara aktivitas pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Pangandaran menjadi ciri khas perekonomian Kabupaten Pangandaran yang mampu bersaing dengan produk-produk impor yang masuk akibat meningkatnya globalisasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Strategi WT, merupakan bentuk dari strategi defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari

ancaman eksternal yang ada dan akan dihadapi oleh daerah. Strategi WT yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal yang telah dilakukan diantaranya adalah:

1. Hal yang perlu dihindari oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah terhambatnya upaya untuk melakukan proses reformasi birokrasi pemerintah. Kondisi ini akan berdampak pada aktivitas andalan daerah yaitu pariwisata – berupa penanganan yang lambat terhadap potensi bencana sehingga memperkecil terwujudnya sustainable tourism, hilangnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah, serta terkikisnya budaya dan kearifan lokal. Apabila hal ini terjadi maka pariwisata di Kabupaten Pangandaran akan ditinggalkan oleh para wisatawan baik dari domestik maupun wisatawan mancanegara.
2. Sustainable tourism hanya akan bisa terwujud jika Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mampu meningkatkan penegakkan regulasi (law enforcement) di bidang tata ruang.
3. Peningkatan infrastruktur secara umum dan infrastruktur pariwisata secara khusus dan juga peningkatan sumberdaya manusia akan meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Pangandaran, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan – baik domestik maupun mancanegara.
4. Social acceptabel dari aktivitas pariwisata menjadi prasyarat bagi terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan akan tercipta apabila ada kemitraan antara masyarakat dengan para pelaku di industri pariwisata.

1.6 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.7 Sistematika Penyusunan LKJiP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah selama tahun 2023. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2023 tersebut diperoleh dari perbandingan atas hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah setiap tahun terhadap rencana kinerja (*Performance Plan*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini menguraikan keberhasilan, hambatan, dan permasalahan sehingga memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum Kabupaten Pangandaran, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dasar Hukum Penyusunan LKJIP dan Sistematika Penyajian LKJIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan RPJMD untuk periode Tahun 2021-2026, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program prioritas pembangunan daerah dan indikator target sasaran prioritas pembangunan tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, pengukuran capaian hasil kinerja pemerintah tahun 2023, evaluasi dan analisis capaian kinerja Kabupaten Pangandaran serta penjabaran akuntabilitas keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang disampaikan oleh kepala daerah (Bupati). Perencanaan strategis Kabupaten Pangandaran dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan, program, serta kebijakan pembangunan daerah. RPJMD dalam substansinya memuat berbagai macam isu-isu strategis baik nasional maupun internasional, namun secara sistematis lebih berfokus memuat isu-isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang efektif, fokus, dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

2.1.1 Visi

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran telah membuat visi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 berdasarkan pada kondisi Kabupaten Pangandaran yang dapat dilihat dari peluang, tantangan, serta isu strategis yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah:

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Guna mengimplementasikan visi tersebut secara operasional, maka diperlukan penjabaran pada pokok-pokok visi berdasarkan penjelasannya. Adapun pokok-pokok visi Pemerintah Kabupaten

Pangandaran berdasarkan penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasannya

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai (value) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

2.1.2 Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, maka ditetapkan 6 (lima) misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama.

Nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan di suatu daerah. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khusus atau khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang ramah, mawas diri, dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa depan. Bertumpu pada nilai-nilai tersebut, dapat diyakini akan memunculkan tatanan masyarakat yang tentram, tertib, toleransi dan saling menghargai terhadap kesetaraan gender.

2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor yang diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada peluang perluasan lapangan kerja. Pembangunan berbasis pengembangan wisata memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan berbasis wisata merupakan sebuah kerangka yang dapat digunakan pemerintah untuk menggali serta mengembangkan industri pariwisata secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya pengembangan dan penguatan daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran.

3. Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan.

Sebagai bentuk perwujudan memperluas akses masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai sebuah kesepakatan bahwa manusia merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan. Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini juga memberikan kesadaran bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia atau human resource akan berkontribusi besar memberikan dampak bagi percepatan pembangunan. Oleh karena itu, dalam misi kedua ini terfokus pada penguatan sumber daya manusia yaitu pada pengembangan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.

4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Stabilitas dan ketahanan ekonomi dapat ditentukan dari kondisi makro ekonomi yang meliputi kebijakan jangka menengah ke panjang, kinerja pemerintah dan juga perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ketahanan ekonomi daerah dilihat melalui indikator laju inflasi, PDRB, dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal. Hal ini guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Penerapan prinsip-prinsip birokrasi sudah seharusnya terfokus pada melayani masyarakat tanpa memandang siapa yang dilayani untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel merupakan syarat wajib bagi percepatan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan upaya suatu pembaharuan dan perubahan yang mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah harus dengan

membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan proses serta hasil akhir (output) yang menggambarkan bagaimana fungsi pemerintah dijalankan.

6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Misi keenam ini terfokus pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata, kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang tangguh bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan pada segala sektor dukungan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata harus diperhatikan. Pada hal ini Kabupaten Pangandaran membutuhkan adanya daya dukung infrastruktur sebagai pendorong pengembangan sektor pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Di samping itu, Kabupaten Pangandaran sebagai daerah rawan bencana perlu adanya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, untuk menghindari dampak negatif dari pembangunan dan dampak dari pasca bencana bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian misi ini.

Tabel 2.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025

MISI RPJMD 2021 – 2026	MISI RPJPD 2016 – 2025
Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama	Misi 2: Membangun SDM yang berkualitas, mandiri dan religius Misi 5: Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada nilai religius dan kearifan lokal
Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur fasilitas yang berwawasan lingkungan
Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan	Misi 2: Membangun SDM yang berkualitas, mandiri dan religius
Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal	Misi 3: Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing

MISI RPJMD 2021 – 2026	MISI RPJPD 2016 – 2025
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Misi 1: Menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih
Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur fasilitas yang berwawasan lingkungan Misi 6: Menciptakan pembiayaan pembangunan daerah yang kolaboratif

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Visi misi yang telah tersusun diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan pada sasaran yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 Tujuan yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:

2.1.3.1. Tujuan dan sasaran Misi-1

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Memperkuat nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
 - 2) Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama

2.1.3.2. Tujuan dan sasaran Misi-2

Dalam rangka pencapaian misi Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata

2.1.3.3 Tujuan dan sasaran Misi-3

Dalam rangka pencapaian misi Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif
 - 2) Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi
 - 3) Melambatnya laju pertumbuhan penduduk
 - 4) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

2.1.3.3. Tujuan dan sasaran Misi-4

Dalam rangka pencapaian misi Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
 - 2) Meningkatnya permukiman layak huni
 - 3) Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
 - 4) Meningkatnya cakupan penanganan PPKS

2.1.3.4. Tujuan dan sasaran Misi-5

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive

2.1.3.5. Tujuan dan sasaran Misi-6

Dalam rangka pencapaian misi Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana, dengan sasaran pembangunan adalah:
 - 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah
 - 2) Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tabel 2.3 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 1 : Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama									
Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya local		Indeks Kesalehan Sosial	N/A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	N/A	0,2344	0,2344	0,2579	0,2814	0,3048	0,3048
		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	N/A	80	82,5	85	87,5	90	90
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7059	0,7689	0,7691	0,7693	0,7696	0,7770	0,7770
Misi 2 : Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan									
Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan local		Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata	N/A	20	30	40	50	60	60
	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	N/A	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	720.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 3 : Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan									
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00
		Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12	90,12
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	79,08	79,88	80,28	80,68	81,08	81,48	81,48
		Indeks Pendidikan	59,33	59,76	60,02	60,33	60,64	60,95	60,95
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	20,24
	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	N/A	5	7,5	10	12,5	15	15
	Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,76%	0,74%	0,73%	0,72%	0,71%	0,71%	0,71%
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	74,61
Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal									
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	5,13	5,48	5,82	6,16	6,50	6,50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.		Persentase Penduduk Miskin	8,99	7,33	6,75	6,17	5,58	5,00	5,00
	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,597	4,667	4,923	5,109	5,310	5,520	5,520
		Persentase Realisasi Nilai Investas	6,25	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	8,38
		Rasio Kewirausahaan	2,54	3,75	3,95	4,15	4,30	4,50	4,50
		Indeks Ketahanan Pangan	81,99	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	73	74	74	74	74	75	75
	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	5,00-4,50	4,90-4,25	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50	4,60-3,50
	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	27	37	47	57	67	77	77
Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel									
Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola	Nilai SAKIP	B	68	70	73	80	82	82
		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks SPBE	3,02	3	3,05	3,1	3,2	3,25	3,25
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00
		Indeks Profesionalitas ASN	38,92	42,42	45,92	49,42	52,92	56,42	56,42
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive	Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,61-2,65	2,66-2,75	2,86-2,95	2,96-3,05	3,06-3,15	3,06-3,15
Misi 6 : Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan									
Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	80	81	82	83	84	84
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,635	1,731	1,788	1,808	1,846	1,865	1,865
		Persentase cakupan layanan infrastruktur	37,64	41,37	44,94	48,28	51,47	54,64	54,64
	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	145	143	141	139	137	135	135
		Indeks Kapasitas Daerah	145,45	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,22	65,54	65,76	65,98	65,98	66,43	66,43

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangadaran 2021-2026

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

2.1.4.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan serta diuraikan dalam tujuan dan sasaran, selanjutnya akan dicapai menggunakan strategi yang dianggap sesuai dengan upaya pencapaian masing-masing sasaran. Strategi untuk setiap sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama			
Tujuan 1: Memperkuat nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Memberdayakan masyarakat untuk saling menjaga kamtibmas	Tahun Pertama: Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Pengurangan biaya produksi, Pemutusan rantai distribusi, inovasi TTG, pemberian bantuan bibit unggul, jaminan BPJS pada pelaku usaha resiko tinggi	
	Meningkatnya pelestarian budaya lokal	Revitalisasi pasar tradisional Pemda	
		Mengoptimalkan kelembagaan	
		Pembangunan lumbung pangan baru	
		Penyediaan lahan untuk membangun gedung kesenian (pusat budaya)	
Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan			
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal	Sasaran 2.1: Peningkatan akses dan kualitas destinasi pariwisata	Mengoptimalkan destinasi pariwisata yang sudah ada	
		Melanjutkan penataan kawasan destinasi wisata yang sudah ada	
		Pembukaan rute penerbangan, simpul transportasi, dan pembukaan trayek	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pembentukan dan pengelolaan desa wisata mandiri (awal dari desa presisi	
		Penetapan ciri khas tata bangunan/ arsitektur gedung dan bangunan	
		Pemenuhan sarpras dan pelayanan sesuai GSTC	
		Peningkatan pelayanan pariwisata	
		Mengundang investor penyelenggaraan wisata	
Misi 3 Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan			
Tujuan 3: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Sasaran 3.1: Meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat	Pemberian beasiswa bagi dokter PNS	
		Pembentukan Perda	
		Integrasi/perluasan cakupan JKN	Tahun Keempat: Peningkatan Daya Saing Daerah
		Pemberian bantuan ambulance bagi desa yang jauh dari puskesmas	
		Pembayaran JKN oleh Pemda untuk para Lansia	
	Sasaran 3.2: Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Optimalisasi kualitas pelayanan, sarana dan Prasarana Pendidikan serta peningkatan peran, pelatihan kepemudaan dalam bidang keolahragaan	
	Sasaran 3.3: Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui Program Keluarga Berencana	
	Sasaran 3.4: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pelatihan pemberdayaan perempuan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal			
Tujuan 4: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat	Sasaran 4.1: Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan konektivitas antar pusat kegiatan, tempat-tempat wisata, dan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tinggi bagi pengembangan ekonomi masyarakat	
	Sasaran 4.2: Meningkatnya permukiman layak huni	Menerapkan arsitektur kawasan pada bangunan milik pemerintah daerah	
	Sasaran 4.3 : Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Pemberian beasiswa bagi guru yang belum S1	
	Sasaran 4.4: Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Pelayanan Sosial pada PPKS melalui peningkatan alat bantu dan Peningka - tan SPM Sosial serta Peningkatan kualitas dan kemampuan PSKS dalam menangani PPKS	
Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel			
Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Sasaran 5.1: Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Melakukan penataan lingkungan pusat pemerintahan	Tahun Kelima: Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi
	Sasaran 5.2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Implementasi OSS	
Misi 6 Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan			
Tujuan 6: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan	Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah	Melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Tahun Ketiga: Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
	Sasaran 6.2: Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Memenuhi kebutuhan ruang untuk pelaksanaan pembangunan	
		Membangun sarana dan prasarana perkantoran	
		Meningkatkan akses air minum dan sanitasi	
		Menyelenggarakan pelatihan,mitigasi kebencanaan	

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2022

2.1.4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 beserta keterkaitannya dengan rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dipilih sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah”.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama, berdasarkan PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran

NO	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
2	Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata (Persen)	N/A	20	30	40	50	60	60
3	Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00
4	Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12	90,12
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	5,13	5,48	5,82	6,16	6,50	6,50
6	Persentase Penduduk Miskin	8,99	7,5-7,0	7,0-6,5	6,5-6,0	6,0-5,5	5,5-5,0	5,5-5,0
7	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
8	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	80	81	82	83	84	84

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026.

Tabel 2.7 Indikator Sasaran (Impact) Tahun 2022-2026 Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama								
Indeks Kesalehan Sosial	N/A	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00	Kesbangpol
Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	N/A	0,2344	0,2344	0,2579	0,2814	0,3048	0,3048	Satpol-PP, BPBD
Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	N/A	80	82,5	85	87,5	90	90	Kesbangpol
Indeks Desa Membangun	0,7059	0,7689	0,7691	0,7693	0,7696	0,7770	0,7770	DinsosPMD
Misi 2 Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan								
Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata (Persen)	N/A	20	30	40	50	60	60	Disparbud
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	N/A	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	720.000	Disparbud

Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 3 Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan								
Indeks Pembangunan Manusia	68,06	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	70,53-71,00	BPS
Indeks Pembangunan Gender	89,78	89,95	90,01	90,07	90,12	90,12	90,12	
Indeks Kesehatan	79,08	79,88	80,28	80,68	81,08	81,48	81,48	Dinkes
Indeks Pendidikan	59,33	59,76	60,02	60,33	60,64	60,95	60,95	Disdikpora
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16,37	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	20,24	Dispusip
Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat penghargaan	N/A	38	38	40	40	45	45	Disdikpora
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,59	Dkbp3a
Indeks Pemberdayaan Gender	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	74,61	Dkbp3a
Misi 4 Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi local								
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,05	5,13	5,48	5,82	6,16	6,50	6,50	BPS
Persentase Penduduk Miskin	8,99	7,5-7,0	7,0-6,5	6,5-6,0	6,0-5,5	5,5-5,0	5,5-5,0	DinsosPMD
PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,597	4,667	4,923	5,109	5,310	5,520	5,520	Dinas Pertanian
Persentase Realisasi Nilai Investasi	6,25	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	8,38	DPMPTSP
Rasio Kewirausahaan	2,54	3,75	3,95	4,15	4,30	4,50	4,50	DKUKMPP
Indeks Ketahanan Pangan	81,99	81,5	82	82,5	83	83,5	83,5	DKPKP
Persentase Rumah Layak Huni (Persen)	73	74	74	74	74	75	75	DPUPRTRKP
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,08	5,00-4,50	4,90-4,25	4,80-4,00	4,70-3,75	4,60-3,50	4,60-3,50	Disnaker
Persentase PPKS yang Mandiri	27	37	47	57	67	77	77	DinsosPMD
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel								
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A	Setda
Nilai SAKIP	B	68	70	73	80	82	82	Bappeda
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
Nilai LKE Kabupaten/Kota	CC	B	BB	A	A	AA	AA	Inspektorat
Indeks SPBE	3,02	3	3,05	3,1	3,2	3,25	3,25	Diskominfo
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	69,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	BKAD
Indeks Profesionalitas ASN	38,92	42,42	45,92	49,42	52,92	56,42	56,42	Bkpsdm
Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,61-2,65	2,66-2,75	2,86-2,95	2,96-3,05	3,06-3,15	3,06-3,15	Disdukcapil
Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan								
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78	80	81	82	83	84	84	DPUPRTRKP
Indeks Konektivitas Wilayah	1,635	1,731	1,788	1,808	1,846	1,865	1,865	DPUPRPRKP
Persentase cakupan layanan infrastruktur	37,64	41,37	44,94	48,28	51,47	54,64	54,64	Dishub
Indeks Risiko Bencana	145	143	141	139	137	135	135	BPBD

Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kapasitas Daerah	145,45	143,4	142	139,2	137,84	136,44	136,44	Dinsospmd
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,22	65,54	65,76	65,98	66,20	66,43	66,43	DLHK

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *outcome* dan *output* yang ingin di wujudkan oleh suatu organisasi pada suatu tahun tertentu. RKT diperlukan agar dalam penyusunan RKPD fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RPJMD sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (*output*), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (*outcome*) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen Bupati yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		2023
Misi 1 : Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama		
Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2344
	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	82,5
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7691
Misi 2 : Mengembangkan Wisata Dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan		
Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	630.000
Misi 3 : Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan Dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Serta Peningkatan Kompetensi Lulusan		
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	80,28
	Indeks Pendidikan	60,02
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,16
Meningkatkan Jumlah Pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	7,5
Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,73%
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,58

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		2023
Misi 4 : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal		
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,923
	Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,24
	Rasio Kewirausahaan	3,95
	Indeks Ketahanan Pangan	82
Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	74
Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,90 - 4,25
Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	47
Misi 5 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel		
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	70
	Tingkat Maturitas SPIP	3
	Indeks SPBE	3,05
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,00
	Indeks Profesionalitas ASN	45,92
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	2,66 - 2,75
Misi 6 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan		
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,788
	Persentase cakupan layanan infrastruktur	44,94
Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	141
	Indeks Kapasitas Daerah	142
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,76

Sumber: Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran, Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sudah menjadi kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang merupakan bentuk dari akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja dapat diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja dan realisasi kinerja, sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya. Capaian atas kinerja instansi pemerintah perlu menjelaskan pula terkait sumber daya yang mendukung keberhasilan ataupun ketidakberhasilan, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Komitmen pemerintah pusat terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal tersebut mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tertuang pada dokumen perencanaan. Pada konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara indikator dan

target strategis yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (realisasi positif), maka digunakan rumus sebagai berikut: Persentase Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
Rumus 2	Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (realiasi negatif), maka digunakan rumus sebagai berikut: Persentase Capaian = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan % (persentase) capaian kinerja. Sedangkan penilaian capaian kinerja sasaran untuk kelompok indikator (lebih dari satu indikator), maka kesimpulan capaian kinerja menggunakan metode composite (rata-rata capaian kinerja seluruh kelompok indikator).

Hasil nilai composite ini dihitung dengan menambahkan hasil persentase (%) capaian kinerja setiap indikator (dalam kelompok indikator sasaran) dan dibagi dengan jumlah indikator yang ada di dalam kelompok tersebut. Maka, disimpulkan nilai capaian kinerja sasaran strategis yang diukur dengan kelompok indikator adalah sebagai berikut:

Capaian rata – rata kinerja

$$= \frac{\text{Jumlah Persentase (\%) Capaian seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Indikator Setiap Sasaran}}$$

Hasil dari perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan atas tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval sebagai berikut :

Tabel 3 .1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 Capaian Kinerja 2023

Pengukuran capaian kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 .2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	T.1 Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	Indeks Kesalehan Sosial	61,00	81,94	134%	Sangat Tinggi
2.	S.1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2344	0,4975	212%	Sangat Tinggi
3		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	82,5	59,7	72%	Sedang

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
4	S2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7691	0,8413	109%	Sangat Tinggi
5	T.2 Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	30	62	207%	Sangat Tinggi
6	S.3 Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	630.000	1.998.592,23	317%	Sangat Tinggi
7	T.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	Indeks Pembangunan Manusia	69,12-69,59	70,57	101%	Sangat Tinggi
8		Indeks Pembangunan Gender	90,01	90,2	100%	Sangat Tinggi
9	S.4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	80,28	84,43	105%	Sangat Tinggi
10		Indeks Pendidikan	60,02	60,97	102%	Sangat Tinggi
11		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,16	19,62	102%	Sangat Tinggi
12	S.5 Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	100	50	50%	Sangat Rendah
13	S.6 Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,73%	0,67%	92%	Sangat Tinggi
14	S.7 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,58	76,09	102%	Sangat Tinggi
15	T.4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,48	5,26	96%	Sangat Tinggi
16		Persentase Penduduk Miskin	6,75	8,98	133%	Sangat Tinggi
17	S.8 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,923	Nilai belum rilis	-	-
18		Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,24	-13,59	-188%	
19		Rasio Kewirausahaan	3,95	24,39	617%	Sangat Tinggi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
20		Indeks Ketahanan Pangan	82	83,57	102%	Sangat Tinggi
21	S.9 Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	74	88,26	119%	Sangat Tinggi
22	S.10 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,90-4,25	1,52	280%	Sangat Tinggi
23	S.11 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	47	112,14	239%	Sangat Tinggi
24	T.5Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (70)	BB (73,72)	108%	Sangat Tinggi
25	S.12 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP	B (70)	B (67,99)	97%	Sangat Tinggi
26		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%	Sangat Tinggi
27		Indeks SPBE	3,05	3,53	116%	Sangat Tinggi
28		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,00	Nilai belum rilis dari Kemendagri	-	-
29		Indeks Profesionalitas ASN	45,92	55,89	122%	Sangat Tinggi
30	S.13 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	2,66-2,75	4,07	148%	Sangat Tinggi
31	T.6 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	81	Nilai belum rilis	-	-
32	S.14 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,788	1,721	97%	Sangat Tinggi
33		Persentase cakupan layanan infrastruktur	44,94	54,98	122%	Sangat Tinggi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
34	S.15 Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	141	147,85	105%	Sangat Tinggi
		Indeks Kapasitas Daerah	142	137,36	97%	Sangat Tinggi
36	S.16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,76	64,44	98%	Sangat Tinggi

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Misi 1:

Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.

Tujuan 1 :

Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal

Tabel 3 .3 Capaian Kinerja Tujuan 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesalehan Sosial	61	81,94	134%	Sangat Tinggi

Sumber data: Satpol-PP, Bakesbangpol

Indeks ini menggambarkan tingkat kesalehan sosial umat beragama. Metode analisa penyusunan IKS menggunakan analisa melalui Survei terhadap dimensi yang meliputi Kepedulian Sosial, Relasi Antar Manusia, Etika dan Budi Pekerti, Melestarikan Lingkungan dan Patuh pada Peraturan Negara. Analisa ini mengukur hubungan antara pengetahuan dengan sikap atau perilaku.

Sasaran 1 :

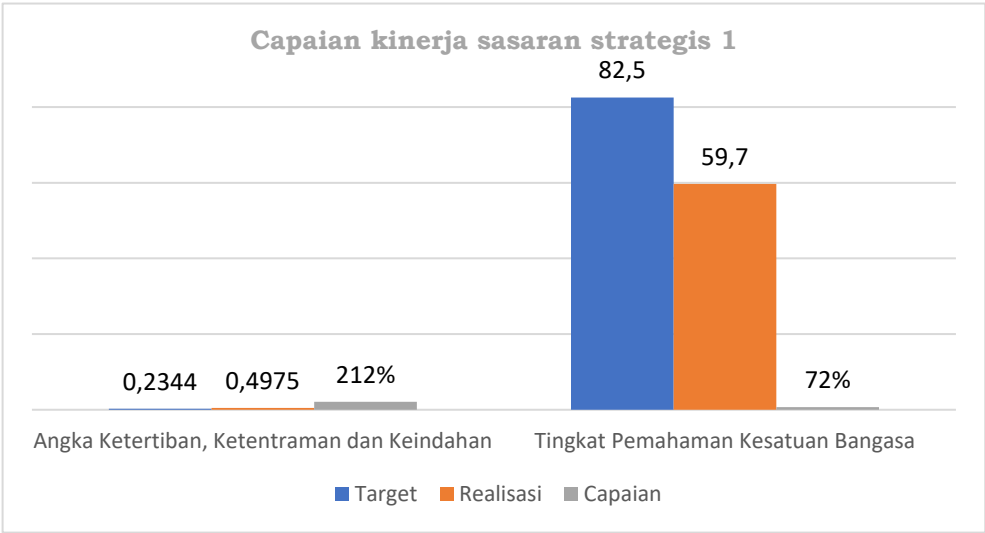
Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin tolerasni dan kerukunan umat beragama.

Tabel 3 .4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Ketertiban,Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2344	0,4975	212%	Sangat Tinggi
Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	82,5	59,7	72%	Sedang

Sumber data: Satpol-PP, Bakesbangpol

Capaian Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani telah dijelaskan pada tabel diatas adalah 212% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,2344 dan terealisasi sebesar 0,4975. Realisasi telah melebihi target. Selanjutnya Tingkat Pemahaman



Kesatuan Bangsa mempunyai nilai capaian 72% dari target 82,5 dan terealisasi sebesar 59,7.

Gambar 3 .1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Sumber data: Satpol-PP, Bakesbangpol

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 1

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol-PP	11.525.159.147	8.273.099.871	71,78%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol-PP	2.605.494.616	2.386.000.318	91,58%
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	1.178.235.183	807.113.474	68,50%
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Bakesbangpol	224.755.000	147.358.000	65,56%
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	2.026.139.530	1.994.329.100	98,43%

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
6	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol	129.764.000	121.922.000	93,96%
7	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	Bakesbangpol	37.220.000	24.400.000	65,56%
Jumlah			17.726.767.476	13.754.222.763	77,59%

Sumber data : Satpol-PP, Bakesbangpol

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Banyaknya laporan dari masyarakat;
- 2) Respon cepat anggota yang bertugas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban;
- 3) Jumlah personil, sarana dan prasarana yang terbatas;
- 4) Jarak tempuh ke tempat kejadian yang cukup jauh sehingga kebakaran tidak tertangani;
- 5) Ada kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi pembayaran pada tahun selanjutnya

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran sesuai dengan target akhir RPJMD diperlukan upaya sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian target serta optimalisasi penanganan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan;
- 2) Optimalisasi penanganan kebakaran;
- 3) Penundaan pembayaran dan di bayarkan tahun selanjutnya

Sasaran 2 :

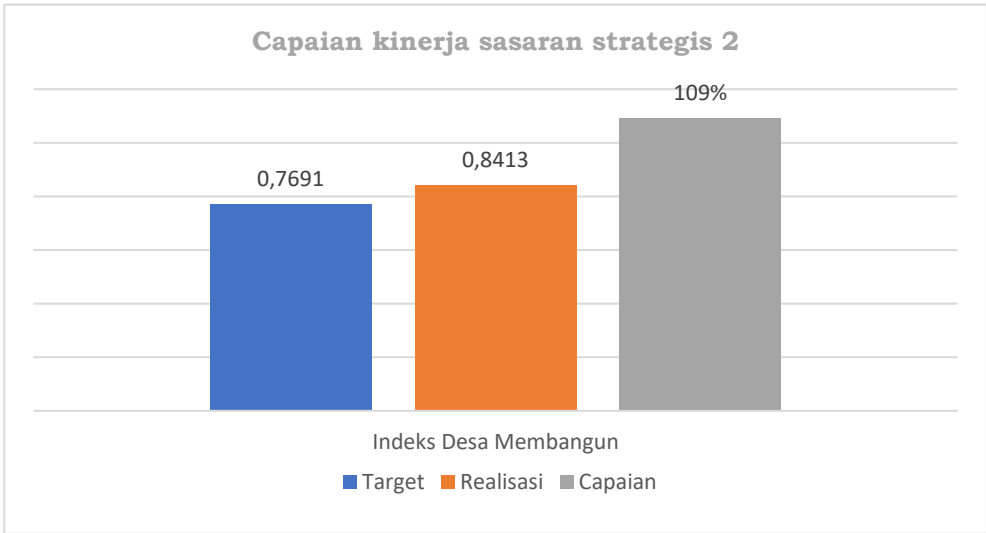
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa

Tabel 3 .6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Desa Membangun	0,7691	0,8413	109%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Indeks Desa Membangun yang telah dijelaskan pada tabel diatas adalah 109% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,7691 dan terealisasi sebesar 0.8413.



Gambar 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2
Sumber data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran 2

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DinsosPMD	753.291.366	315.879.600	41,93%
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DinsosPMD	3.541.321.185	2.991.482.499	84,47%
Jumlah			4.294.612.551	3.307.362.099	77,01%

Sumber data : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah setelah dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa mampu menganalisa Indek Kompositnya yang lemah sehingga Pemerintah Desa dalam menyusun arah pembangunannya difokuskan pada peningkatan indek komposit.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah Optimalisasi Pembinaan Pemerintah Desa.

Misi 2:

Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

Tujuan 2 :

Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Tabel 3 .8 Capaian Kinerja Tujuan 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	30	62	207%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kriteria Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dibuat untuk memberikan pemahaman bersama tentang pariwisata berkelanjutan. Kriteria Destinasi GSTC – secara informal dikenal sebagai “GSTC-D” – merupakan kriteria minimum yang seyogianya ingin dicapai oleh setiap destinasi pariwisata. Kriteria GSTC-D ini tersusun ke dalam empat tema: pengelolaan berkelanjutan; dampak sosial-ekonomi; dampak budaya; dan dampak lingkungan. Kriteria-kriteria itu dapat diterapkan pada semua sektor pariwisata.

Sasaran 3 :

Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata

Tabel 3 .9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	630.000	1.998.592,23	317%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Target Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan adalah sebesar 630.000 realisasi 1.998.592,23 dengan capaian kinerja tahun 2023 317%



Gambar 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .10 Penyerapan anggaran program penunjang sasaran 3

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparbud	6.751.041.396	4.806.966.052	71,20%
2	Program Pemasaran Pariwisata	Disparbud	459.048.200	282.036.980	61,44%
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparbud	18.980.080	14.108.564	74,33%
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud	99.666.134	-	0%
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud	788.367.800	608.523.948	77,19%
6	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disparbud	112.353.400	15.789.235	14,05%
Jumlah			8.229.457.010	5.727.424.779	69,60%

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah

- 1. Sebagian kegiatan dan program tidak dilaksanakan
- 2. Kekurangan Tim Ahli Cagar Budaya sehingga penetapan tidak bisa dilaksanakan

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah

- 1. Perencanaan dan Penganggaran disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

2. Kegiatan kembali di rencanakan dan lebih dipersiapkan terkait teknis kegiatannya

Misi 3:

Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan

Tujuan 3 :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

Tabel 3 .11 Capaian Kinerja Tujuan 3

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Manusia	69,12-69,59	70,57	101%	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Gender	90,01	90,2	100%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-ratalama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator GNI per kapita.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari tiga dimensi capaian dasar

manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sasaran 4 :

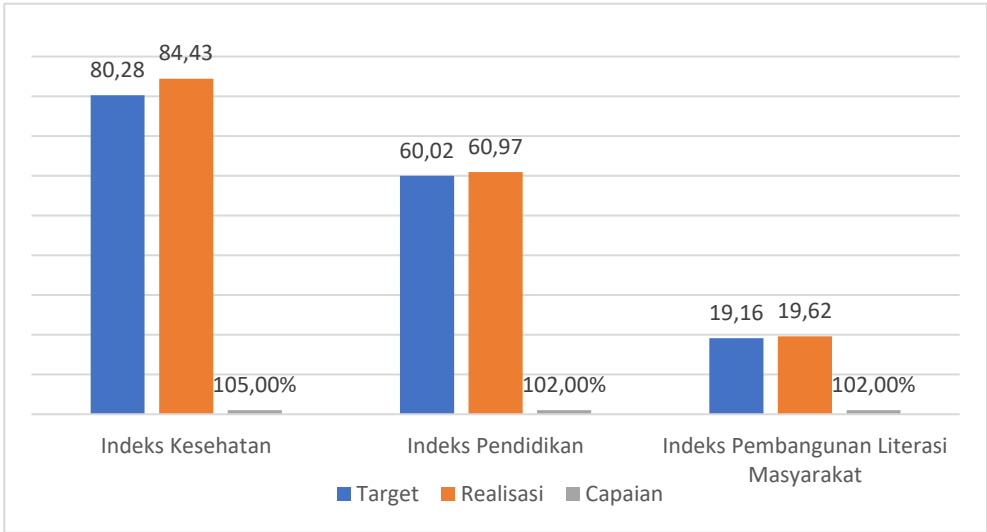
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif

Tabel 3 .12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	80,28	84,43	105%	Sangat Tinggi
Indeks Pendidikan	60,02	60,97	102%	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,16	19,62	102%	Sangat Tinggi

Sumber data:Dinas Kesehatan,Disdikpora,Dispusip

Capaian Indeks Kesehatan yang telah dijelaskan pada table diatas adalah 105% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80,28 dan terealisasi sebesar 84,43. Capaian indeks Pendidikan diatas adalah 102% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60,02 dan terealisasi sebesar 60,97 sedangkan Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diatas adalah 102,2% dari target yang telah ditetapkan sebesar 19,16 dan teralisasi 19,62.



Gambar 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sumber: Dinas Kesehatan,Disdikpora,Dispusip

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .13 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 4

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	120.656.688.168	82.089.614.083	68,04%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	9.304.799.088	3.453.082.290	37,11%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	415.822.000	415.822.000	100%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	762.536.876	761.055.080	99,81%
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	129.062.420.677	91.810.011.808	71%
6	Program Pengembangan Kurikulum	Disdikpora	369.999.748	369.999.748	100%
7	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Disdikpora	7.030.674.800	3.970.768.000	56%
8	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Disdikpora	149.991.640	149.991.640	100%
9	Program Pembinaan Perpustakaan	Dispusip	833.258.893	628.693.700	75,45%
Jumlah			268.586.191.890	183.649.038.349	68,38%

Sumber data : Dinas Kesehatan,Disdikpora,Dispusip

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Faktor ketercapaian Indek Pendidikan yaitu meningkatnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
- 2) Adanya efisiensi anggaran dan mengutamakan kegiatan yang lebih prioritas;

- 3) Tingkat kunjungan masyarakat tidak tercapai dikarenakan ada perluasan Gedung Perpustakaan maka jam kunjungan dibatasi untuk alasan keamanan kerja;
- 4) Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi tidak tercapai karena kunjungan menurun, maka berdampak kepada kegiatan sosialisasi.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain adalah:

- 1) Tingkat kunjungan menurun salah satu solusi nya adalah dengan menambah armada Perpustakaan Keliling;
- 2) Kegiatan sosialisasi menurun bisa diatasi dengan sosialisasi langsung door to door ke tiap-tiap perpustakaan dan komunitas baca yang ada di Kabupaten Pangandaran;
- 3) Meningkatkan rata-rata lama sekolah dengan meningkatkan peserta didik kesetaraan baik itu Paket A, Paket B dan Paket C;

Sasaran 5 :

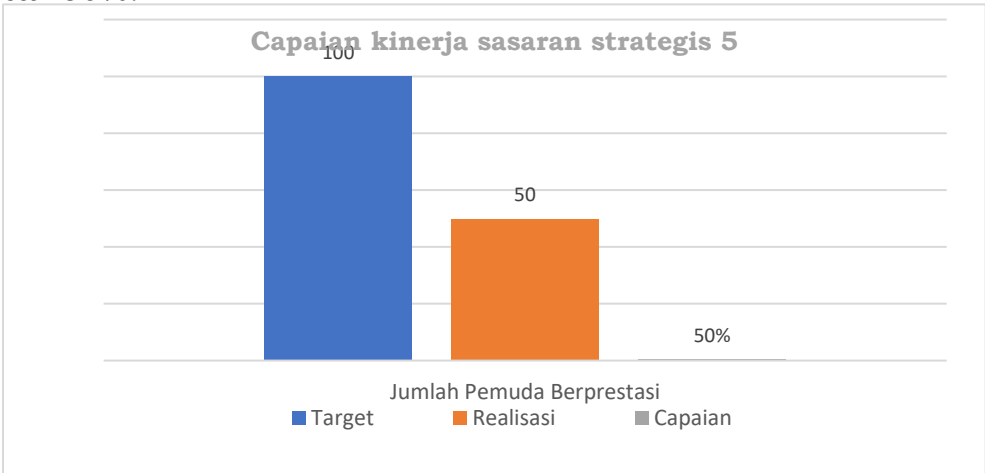
Meningkatnya jumlah pemuda berprestasi

Tabel 3 .14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	100	50	50%	Sangat Rendah

Sumber data: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Capaian sasaran Strategis 5 berkaitan dengan Jumlah pemuda berprestasi yang mendapatkan penghargaan adalah sebesar 50%. Realisasi kinerja jumlah pemuda berprestasi yang mendapatkan penghargaan adalah sebesar 50 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 100 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 50%.



Gambar 3 .5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .15 Penyerapan Anggaran Program Penunjang sasaran strategis 5

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	2.999.999.960	1.821.968.700	60,73%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	19.748.464.193	9.586.726.982	48,54%
Jumlah			222.748.464.15	11.408.695.682	50,15%

Sumber data : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Kurangnya pembinaan olahraga;
- 2) Kurangnya Event/Kejuaraan tingkat Kabupaten;
- 3) Kurangnya cabang olahraga yang diikuti.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain adalah:

- 1) Memasyarakatkan cabang olahraga yang lainnya;
- 2) Melakukan pembinaan sejak dini;
- 3) Mengadakan kejuaraan berjenjang dan berkesinambungan.

Sasaran 6 :

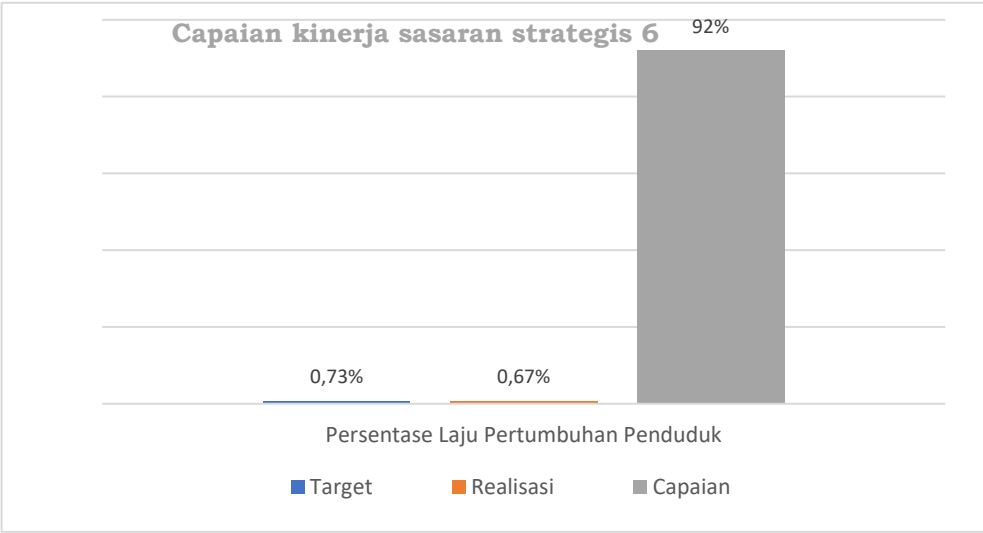
Melambatnya laju pertumbuhan penduduk

Tabel 3 .16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase laju pertumbuhan penduduk	0,73%	0,67%	92%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian sasaran Strategis 6 berkaitan dengan Persentase laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 92%. Realisasi kinerja Persentase laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 0,67% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 0,73% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 92% atau Sangat Tinggi.



Gambar 3 .6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .17 Penyerapan Anggaran Program Penunjang sasaran strategis 6

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengendalian Penduduk	DKBP3A	256.912.180	250.748.680	97,60%
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DKBP3A	3.665.144.840	3.405.461.718	92,91%
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	DKBP3A	2.433.160.000	2.430.629.200	99,90%
Jumlah			6.355.217.020	6.086.839.598	95,78%

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Realisasasi belanja seusai tagihan real, adanya penyesuaian pembayaran dengan kondisi keuangan
- 2) Perjanjian kontrak dengan Pihak Ketiga terkait penyediaan jasa pulsa dijalin sejak bulan April karena anggaran DAK baru turun bulan April

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain adalah:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran
- 2) Kontrak dibuat sejak awal tahun

Sasaran 7 :

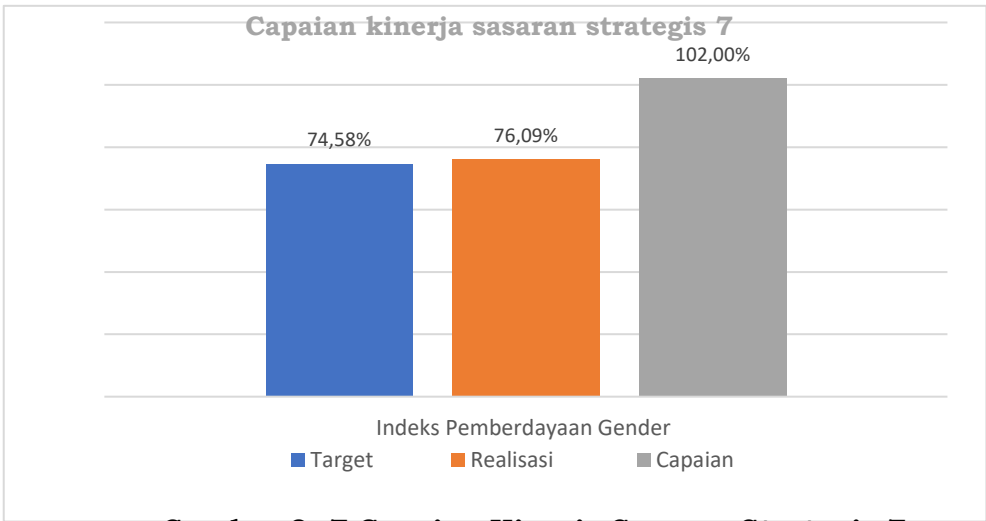
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Tabel 3 .18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pemberdayaan Gender	74,58%	76,09	102%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian sasaran Strategis 7 berkaitan dengan Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 102%. Realisasi kinerja Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 76,09% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 74,58% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 102% atau Sangat Tinggi.



Gambar 3 .7 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .19 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 7

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DKBP3A	649.074.840	542.657.838	83,60%

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DKBP3A	190.183.600	90.000.000	47,32%
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DKBP3A	88.433.280	82.133.280	92,88%
Jumlah			927.691.720	714.791.118	77,05%

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah Penyesuaian pembayaran dengan kondisi keuangan.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Misi 4 :

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal

Tujuan 4 :

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3 .20 Capaian Kinerja Tujuan 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,48	5,26	96%	Sangat Tinggi
Persentase Penduduk Miskin	6,75	8,98	133%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran 8 :

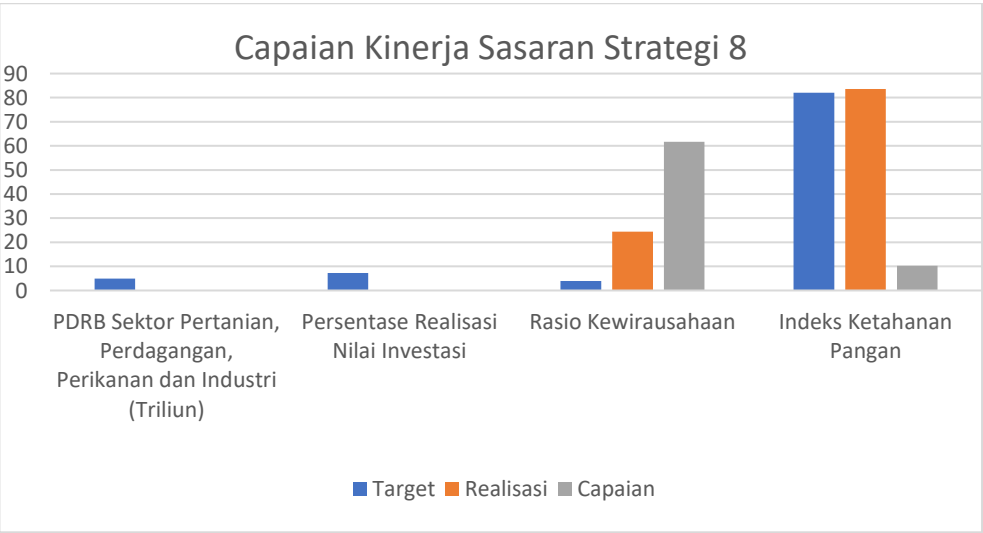
Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Tabel 3 .21 Capaian kinerja sasaran strategis 8

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,923	Nilai belum rilis	-	-
Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,24	-13,59	-188%	
Rasio Kewirausahaan	3,95	24,39	617%	Sangat Tinggi
Indeks Ketahanan Pangan	82	83,57	102%	Sangat Tinggi

Sumber data: DKUKMPP,DKPKP,DPMPTSP

Capaian persentase realisasi nilai investasi berada pada capaian -188% Dengan realisasi sebesar -13,59 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 7,24 sehingga capaian kinerjanya mengalami penurunan yang signifikan Capaian rasio kewirausahaan berada pada predikat sangat tinggi dengan capaian sebesar 617%. Dengan realisasi sebesar 24,39 dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 adalah sebesar 3,95 sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 617%. Capaian persentase Indeks Ketahanan Pangan berada pada predikat sangat tinggi dengan capaian sebesar 102%. Dengan realisasi sebesar 83,57 dari target yang ditetapkan sebesar 82. Untuk indikator PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri nilai untuk tahun 2023 masih belum rilis.



Gambar 3. 8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8
Sumber data: DKUKMPP,DKPKP,DPMPTSP

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .22 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 8

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskopdagin	45.148.800	32.481.600	71,94%
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Diskopdagin	272.206.400	36.795.800	13,52%
3	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Diskopdagin	31.870.600	29.748.200	93,34%
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskopdagin	44.650.000	44.650.000	100%

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
5	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Diskopdagin	616.957.194	602.603.944	97,67%
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Diskopdagin	5.644.800	5.633.600	99,80%
7	Program Pengembangan UMKM	Diskopdagin	59.485.390	59.485.390	100%
8	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Diskopdagin	43.443.800	30.776.600	70,84%
9	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Diskopdagin	381.283.000	381.283.000	100%
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPKP	3.721.362.644	1.533.361.102	41%
11	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPKP	5.979.455.917	2.270.242.750	38%
12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPKP	123.414.950	121.463.950	98%
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPKP	252.881.217	12.040.000	5%
14	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	DKPKP	203.093.323	183.935.223	91%
15	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPKP	111.960.800	97.960.800	87%
16	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP	178.709.031	65.385.500	37%
17	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	430.565.300	382.813.750	89%
Jumlah			12.502.133.166	5.890.661.209	47,2%

Sumber data: DKUKMPP,DKPKP,DPMPTSP

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah

1. Kondisi tahun 2023 diambil dari data Kewirausahaan yaitu sebanyak 105248 yang merupakan hasil pendataan Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM dan Jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 431.460 sehingga saat itu ratio kewirausahaan adalah 24,39%
2. Pembayaran penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan belum dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2023

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran antara lain:

1. Perubahan Target dan penyeragaman data
2. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Pangandaran
4. Pembayaran penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan akan diselesaikan pada tahun berikutnya

Sasaran 9 :

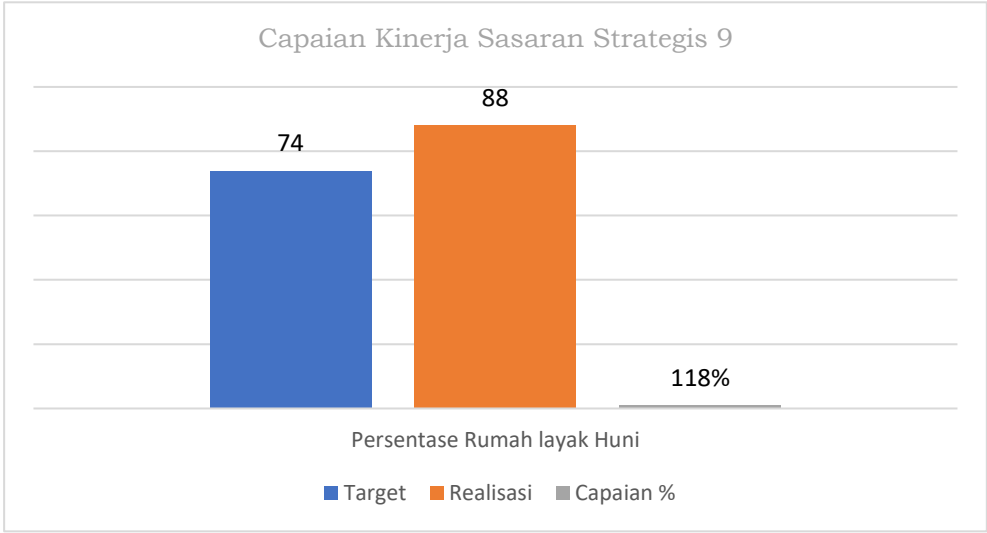
Meningkatnya permukiman layak huni

Tabel 3 .23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Rumah layak Huni	74	88,26	119%	Sangat Tinggi

Sumber data: DPUTRPRKP

Capaian sasaran strategis 9 berkaitan dengan meningkatnya permukiman layak huni. Dengan Persentase Rumah Layak Huni dengan capaian 119% dinilai sangat tinggi. Capaian persentase rumah layak huni berada pada predikat sangat tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan rumah layak huni terkelola dengan cukup baik dan optimal dengan target 2023 74 dan realisasi kinerja 88,26.



Gambar 3. 9 Capaian Kinerja Sasaran strategis 9

Sumber: DPUTRPRKP

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .24 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 9

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Perumahan	DPUTRPRKP	52.359.724.290	26.456.909.525	50,53%
2	Program Kawasan Permukiman	DPUTRPRKP	750.000.000	291.279.900	38,83%
Jumlah			53.109.724.290	26.748.189.425	50,36%

Sumber data : DPUTRPRKP

Target sasaran meningkatnya permukiman layak huni tercapai dengan sangat baik disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. pelaksanan kegiatan yang dilakukan tepat sasaran dan menunjang dengan kegiatan.
2. didukung dengan sarana prasarana yang mendukung.
3. kinerja pegawai yang menangani kegiatan masing-masing dilakukan dengan tepat

Sasaran 10 :

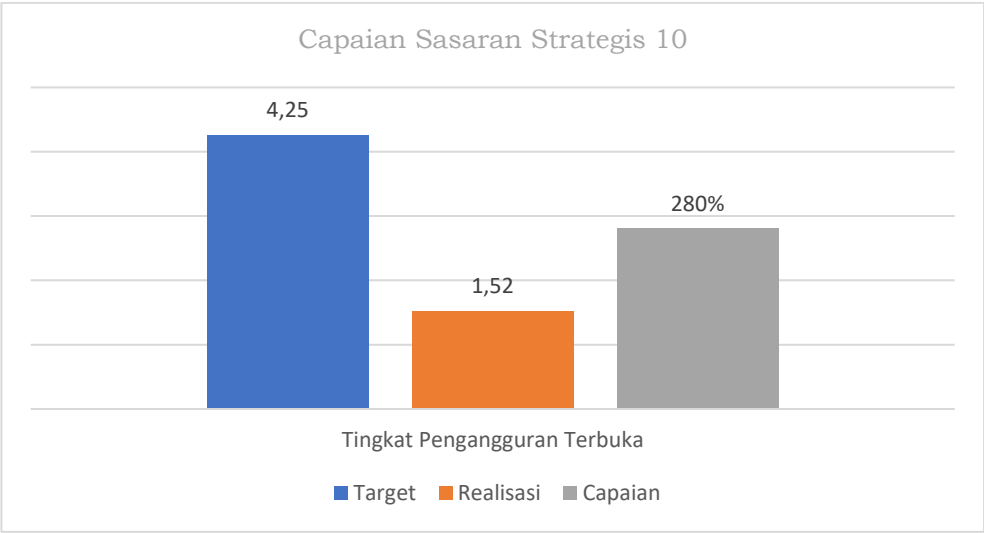
Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja

Tabel 3 .25 Capaian Kinerja Sasaran strategis 10

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,90-4,25	1,52	280%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Ketenagakerjaan

Capaian sasaran strategis 10 berkaitan dengan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang terpenuhi dengan capaian 280% dinilai sangat tinggi. Dengan target tahun 2023 4,90-4,25 dan realisasi 1,52 dengan capaian 280%



Gambar 3 .10 Capaian Kinerja Sasaran strategis 10
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .26 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 10

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	66.987.076	47.556.167	76,99%
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	1.298.157.912	899.524.565	69,29%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	221.514.675	108.451.200	48,96%
4	Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan	216.390.478	193.999.083	89,65%
5	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Ketenagakerjaan	4.999.820	-	-
Jumlah			1.808.049.961	1.249.531.015	69,11%

Sumber data :Dinas Ketenagakerjaan

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah

1. Minat perusahaan di Kabupaten Pangandaran masih kurang dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja.
2. Kabupaten Pangandaran tidak mendapat kuota pemberangkatan transmigran sehingga program ini tidak terlaksana

3. Terdapat satu sub kegiatan yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian program yang hanya terpenuhi sebanyak 80% dari total capaian program ini.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target sasaran adalah

1. Melaksanakan bimbingan terhadap perusahaan dalam Menyusun Rencana Tenaga Kerja.
2. Mempersiapkan calon transmigran sehingga dapat mengajukan kuota pemberangkatan.
3. Memaksimalkan setiap kegiatan sehingga didapat capaian yang maksimal pula dan memberikan kontribusi lebih terhadap capaian program tersebut.

Sasaran 11 :

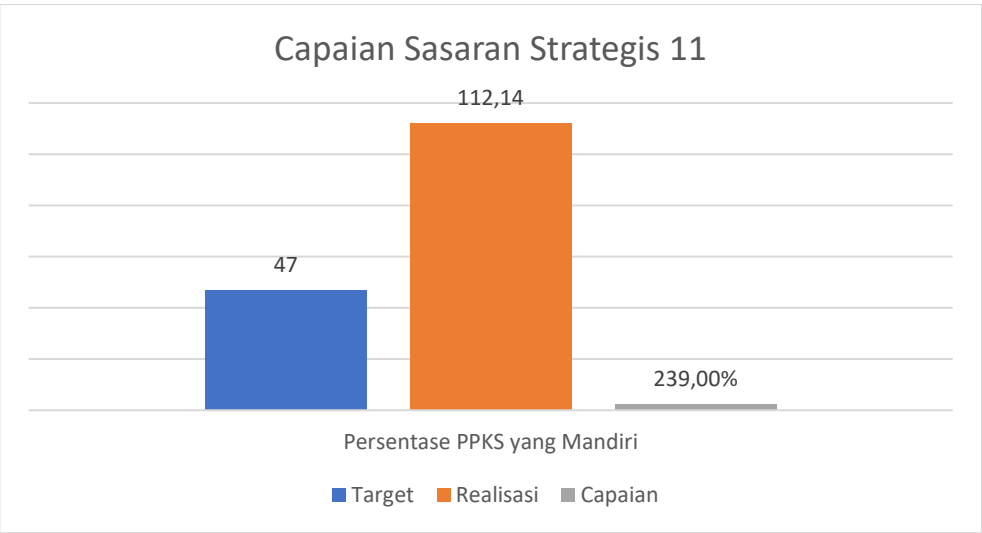
Meningkatnya cakupan penanganan PPKS

Tabel 3 .27 Capaian Kinerja Sasaraan strategis 11

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase PPKS yang Mandiri	47	112,14	239%	Sangat Tinggi

Sumber data: DinsosPMD

Capaian sasaran strategis 11 berkaitan dengan Meningkatnya cakupan penanganan PPKS. Dengan indikator Persentase PPKS yang Mandiri yang terpenuhi dengan capaian 239% dinilai sangat tinggi. Dengan target tahun 2023 47 dan realisasi 112,14 dengan capaian 239%



Gambar 3 .11 Capaian Kinerja Sasaran strategis 11

Sumber: DinsosPMD

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .28 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 11

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsospmd	201.900.000	39.700.000	19,66%
2	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsospmd	3.083.570.810	2.314.790.404	75,07%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinsospmd	2.637.568.816	2.177.777.536	82,57%
4	Program Penanganan Bencana	Dinsospmd	524.876.765	176.236.000	33,58%
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsospmd	103.884.450	60.767.500	58,50%
			6.551.800.841	4.769.271.440	72,90%

Sumber data :DinsosPMD

Ketercapaian target sasaran meningkatnya cakupan penanganan PPKS Pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang tetap sasaran.

Misi 5:

Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Tujuan 7 :

Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima

Tabel 3 .29 Capaian Kinerja Tujuan 7

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	B (64-68)	BB (73,72)	108%	Sangat Tinggi

Sumber data: BKPSDM, DISKOMINFO, INSPEKTORAT, Sekretariat Daerah

Sasaran 12 :

Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Tabel 3 .30 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai SAKIP	70	67,99	97%	Sangat Tinggi
Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%	Sangat Tinggi
Indeks SPBE	3,05	3,53	116%	Sangat Tinggi
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,00	-	-	-
Indeks Profesionalitas ASN	45,92	55,89	122%	Sangat Tinggi

Sumber data: BKPSDM, DISKOMINFO, INSPEKTORAT, Sekretariat Daerah

Capaian sasaran strategis 12 berkaitan dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan indikator nilai SAKIP dengan capaian 97% dinilai Sangat Tinggi. Dengan target tahun 2023 70 dan realisasi 67,99 dengan capaian 97% dan Tingkat Maturitas SPIP dengan capaian 100% dinilai sangat tinggi dengan target tahun 2023 3 dan realisasi 3 sedangkan Indeks SPBE dengan capaian 116% dinilai sangat tinggi dengan target 3,05 dan realisasi 3,53 dan untuk Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian 122% dinilai sangat tinggi dengan target 42,92 dan realisasi 55,89 sedangkan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah hasil penilaiannya belum rilis.

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 .31 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 12

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	3.203.935.240	1.833.489.161	57,23%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	621.145.600	601.378.900	96,82%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFO	324.056.000	115.000.000	35,49%
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT	583.588.457	275.344.000	47,18%
5	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	SETDA	310.176.000	102.078.790	32,91%
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	SETDA	255.740.000	50.250.000	19,65%
JUMLAH			5.298.641.297	2.977.540.851	56,20%

Sumber data: BKPSDM, DISKOMINFO, INSPEKTORAT, Sekretariat Daerah

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Dampak pandemi covid-19 yang masih dirasakan terhadap kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran sehingga BKPSDM perlu mengefisiensi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan menjadi minimum
- 2) Kurangnya pembaruan kondisi cenderung sama dengan sebelumnya sehingga tidak mendorong perbaikan nilai SPBE

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

- 1) Menghimbau kepada ASN Kabupaten Pangandaran untuk mengikuti Diklat/Seminar/Webinar/workshop yang bersertifikat untuk mengembangkan/menambah nilai kompetensi ASN
- 2) Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaporkan data terkait dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin aparatur secara lengkap dalam aplikasi IP ASN dan SAPK
- 3) Menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar skor komponen kualifikasi dapat ditingkatkan
- 4) Kurangnya pembaruan kondisi cenderung sama dengan sebelumnya sehingga tidak mendorong perbaikan nilai

Sasaran 13 :

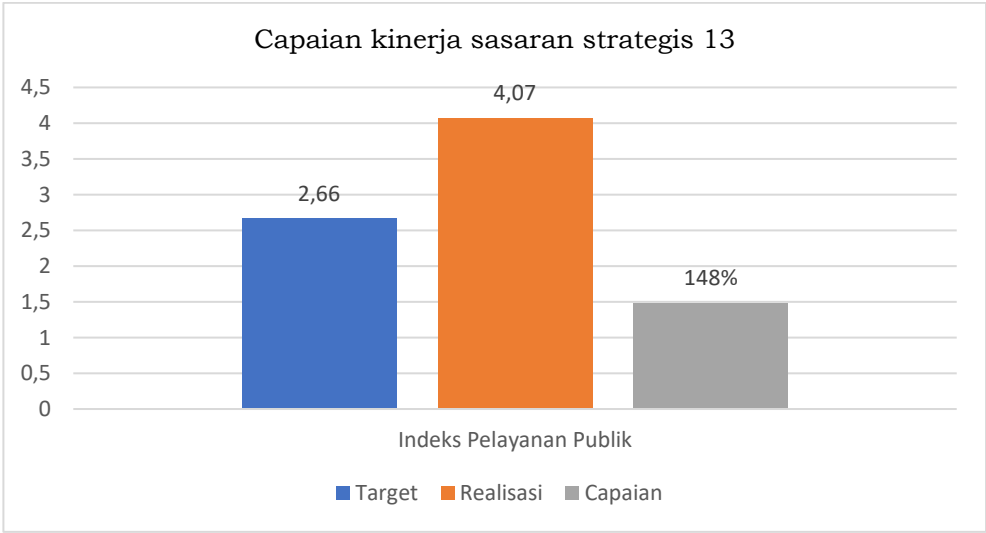
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif

Tabel 3 .32 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pelayanan Publik	2,66-2,75	4,07	148%	Sangat Tinggi

Sumber data: DPMPTSP, Disdukcapil

Capaian sasaran strategis 13 berkaitan dengan Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif. Dengan indikator Indeks Pelayanan Publik yang terpenuhi dengan capaian 148% dinilai sangat baik. Dengan target tahun 2023 2,66-2,75 dan realisasi 4,07 dengan capaian 148%



Gambar 3 .12 Capaian kinerja sasaran strategis 13
Sumber: DPMPTSP, Disdukcapil

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .33 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran strategis 13

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	DPMPTSP DAN DISDUKCAPIL	417.630.000	195.614.723	46,84%
Jumlah			417.630.000	195.614.723	46,84%

Sumber data : DPMPTSP, Disdukcapil

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- 2) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) masih belum dilakukan secara periodik oleh masing-masing OPD, sehingga mengandalkan survei bagian organisasi yang terbatas sampling dan waktunya.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

- 1) Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan;
- 2) Kebijakan setiap OPD melakukan survei kepuasan masyarakat pada setiap layanannya secara periodik dan melaporkan ke sekretaris daerah dan mempublikasikan hasil akhirnya (IKM).

Misi 6:

Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Tujuan 6 :

Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana

Tabel 3 .34 Capaian Kinerja Tujuan 6

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	81	Nilai belum rilis	-	-

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran 14 :

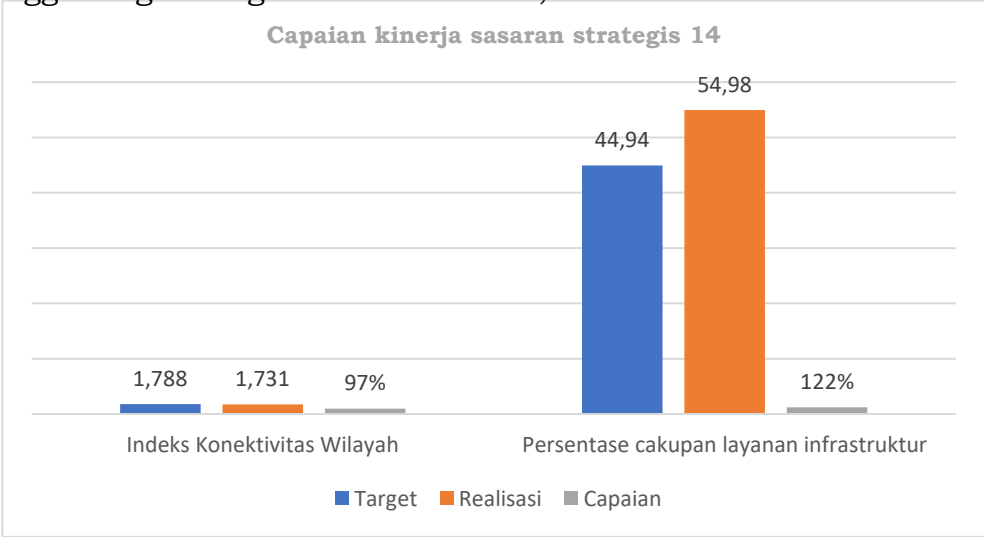
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah

Tabel 3 .35 Capaian Kinerja Sasaran strategis 14

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Konektivitas Wilayah	1,788	1,731	97%	Sangst Tinggi
Persentase cakupan layanan infrastruktur	44,94	54,98	122%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian sasaran strategis 14 berkaitan dengan Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah. Dengan indikator Indeks Konektivitas Wilayah yang terpenuhi dengan capaian 97% dinilai sangat tinggi dengan target tahun 2023 1,788 dan realisasi 1,731 dengan capaian 97% dan Indikator Persentase cakupan layanan infrastruktur yang terpenuhi dengan capaian 122% dinilai sangat tinggi dengan target tahun 2023 44,94 dan realisasi 122%.



Gambar 3 .13 Capaian kinerja sasaran strategis 14
Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .36 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 14

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUTRPRKP	262.712.373.038	163.719.892.609	62,32%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTRPRKP	22.074.969.600,00	21.130.045.761,00	95,72%
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUTRPRKP	631.901.000	631.901.000	100%
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTRPRKP	525.660.000	469.079.250	89,24%
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUTRPRKP	1.059.668.300	885.476.600	83,57%
6	Program Pengembangan Perumahan	DPUTRPRKP	52.359.724.290	26.456.909.525	50,53%
7	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUTRPRKP	13.926.732.000	8.029.542.880	57,66%
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUTRPRKP	1.645.345.471	403.469.063	24,53%
Jumlah			354.936.373.699	221.726.316.688	62,47%

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah Realisasi Kinerja tercapai 100% sedangkan Realisasi Keuangan tidak mencapai karena ada beberapa pekerjaan hingga tanggal 31 Desember 2023 belum dibayarkan dan keterbatasan pendanaan dalam memenuhi Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) yang membutuhkan besarnya keterlibatan tenaga ahli dalam perencanaan pembangunan daerah.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah pemenuhan dana/biaya dalam penyusunan turunan RTRW dan dokumen perencanaan strategis lainnya yang dibutuhkan (Kegiatan yaang dianggarkan).

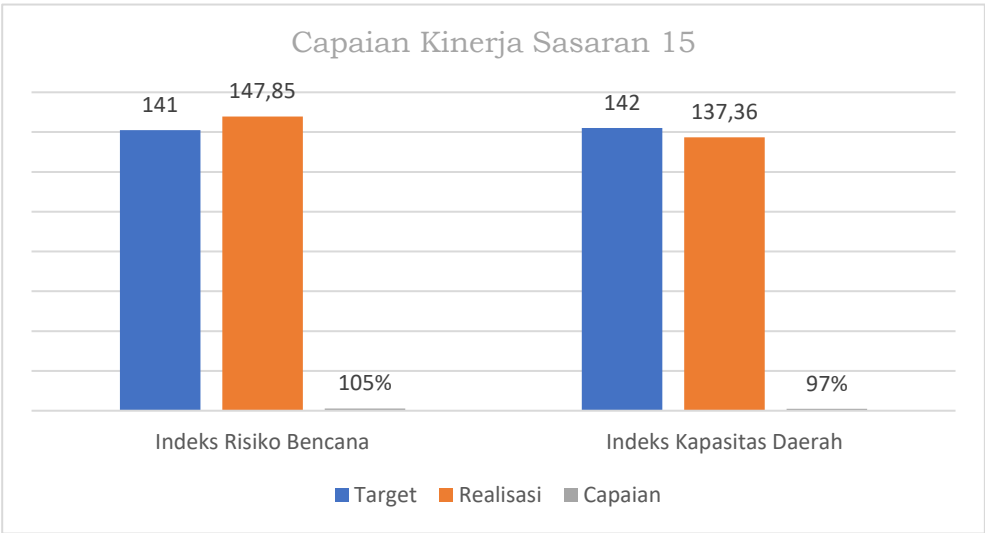
Sasaran 15 :

Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah

Tabel 3 .37 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Risiko Bencana	141	147,85	105%	Sangat Tinggi
Indeks Kapasitas Daerah	142	137,36	97%	Sangat Tinggi

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Gambar 3 .14 capaian kinerja sasaran strategis 15

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .38 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 15

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	10.977.450.948	7.774.195.875	70,82%
Jumlah			10.977.450.948	7.774.195.875	70,82%

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah Perhitungan Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kapasitas Daerah diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurunnya target, realisasi, dan capaian kinerja disebabkan oleh meningkatnya ancaman bencana di Kabupaten Pangandaran yaitu potensi gempa bumi dan tsunami Megathrust dengan magnitude 8,7 SR.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah Mengoptimalkan mitigasi bencana dan penguatan kapasitas daerah

Sasaran 16 :

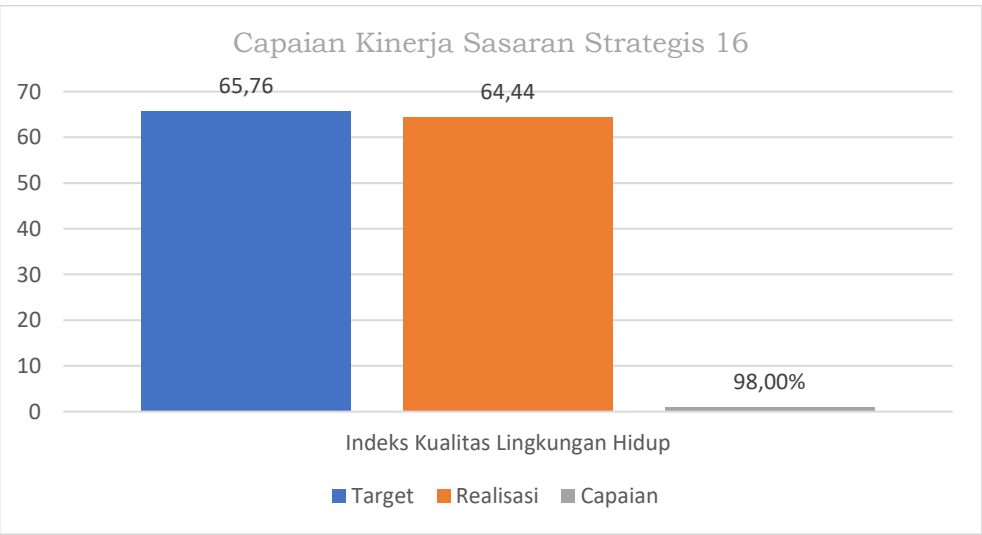
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tabel 3 .39 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023			Kategori
	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,76	64,44	98%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Capaian sasaran strategis 16 terkait dengan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 98% pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target yang ditentukan sebesar 65,76 terealisasi sebesar 64,44 hal tersebut masuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga dapat menunjukkan bahwa kinerja untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup berjalan optimal dan berhasil.



Gambar 3 15 capaian kinerja sasaran strategis 16
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .40 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 16

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHK	164.935.627	15.830.898	9,60%
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK	352.120.565	65.905.500	18,72%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLHK	1.187.310.193	598.803.499	50,44%
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DLHK	14.999.960	12.406.000	82,77%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLHK	18.210.700	16.200.500	88,97%
6	Program Pengelolaan Persampahan	DLHK	4.382.707.710	2.864.638.385	65,37%
Jumlah			6.120.284.755	3.573.784.782	58,40%

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah Adanya penundaan pembayaran kegiatan untuk paket pengadaan Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah Paket kegiatan yang belum dibayarkan akan dibayarkan di tahun 2024 (hutang). Pelaksanaan kegiatan dioptimalkan dengan Anggaran yang tersedia.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui trend pergerakan nilai capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 .41 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	T.1 Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	Indeks Kesalehan Sosial	60	Data Belum Rilis	-	61,00	81,94	134%
2.	S.1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2344	0,5541	236%	0,2344	0,4975	212%
3		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	80	80.19	100.24%	82,5	59,7	72%
4	S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7689	0.7595	98.78%	0,7691	0,8413	109%
5	T.2 Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	20	20	100%	30	62	207%
6	S.3 Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	630.000	646.250	102.58%	630.000	1.998.592	317%
7	T.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	Indeks Pembangunan Manusia	68,50-69,12	69.03	100.77%	69,12-69,59	70,57	101%
8		Indeks Pembangunan Gender	89,91-89,98	Data Belum Rilis	-	90,01	90,2	100%
9	S.4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	79,61-80,10	79.83	100.28%	80,28	84,43	105%
10		Indeks Pendidikan	59,51-59,90	60	100,4%	60,02	60,97	102%
11		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,56	18,02	97,09%	19,16	19,62	102%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
12	S.5 Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	50	67	134%	100	50	50%
13	S.6 Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,58-0,55	1,10%	52,25%	0,73%	0,67%	92%
14	S.7 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,57%	75,98%	-	74,58%	76,09%	102%
15	T.4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,60-5,20	BPS belum rilis data	-	5,48	5,26	96%
16		Persentase Penduduk Miskin	7,00-7,55	9.32	1,20%	6,75	8,98	133%
17	S.8 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	4,667	5.424	116.22	4,923	Nilai belum rilis	-
18		Persentase Realisasi Nilai Investasi	6,89	124	1,799	7,24	-13,59	-188%
19		Rasio Kewirausahaan	3,75	22.69	605%	3,95	24,39	617%
20		Indeks Ketahanan Pangan	82,5	81,12	98,33	82	83,57	102%
21	S.9 Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	74	87,1	117,7	74	88,26	119%
22	S.10 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	9782	4077	239%	4,90-4,25	1,52	280%
23	S.11 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	37	40.63	109.81%	47	112,14	239%
24	T.5 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60-70)	CC (56,48)	90%	B (60-70)	BB (73,72)	105%
25	S.12 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	B (60-70)	B (67,72)	98%	B (70)	B (67,99)	97%
26		Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%	3	3	100%
27		Indeks SPBE	3,04	2,82	92,80%	3,05	3,53	116%
28		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71	Belum ada hasil Penilaian Kemendagri	-	72,00	Nilai belum rilis dari Kemendagri	-
29		Indeks Profesionalitas ASN	42,42	55.84	132%	45,92	55,89	122%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
30	S.13 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	2,61-2,65	3,42	99%	2,66-2,75	4,07	148%
31	T.6 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	78,11	85.50	109%	81	Nilai belum rilis	-
32	S.14 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,731	1,692	98%	1,788	1.731	97%
33		Persentase cakupan layanan infrastruktur	41,37	39%	93%	44,94	54,98	122%
34	S.15 Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	143	137,36	96,73	141	147,85	105%
		Indeks Kapasitas Daerah	143,4	137,36	95,38	142	137,36	97%
36	S.16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,54	69,05	105,36%	65,76	64,44	98%

Sumber: Pangandaran dalam Angka 2023, Bappeda, Sekretariat Daerah.

Berdasarkan penjelasan pada tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun 2022 dan 2023, terdapat beberapa indikator sasaran yang mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya adalah Persentase Pemenuhan Indikator GSTC di Destinasi Pariwisata, capaiannya meningkat menjadi 207% dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian 100%. selain itu Rata-rata Pengeluaran Wisatawan juga mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 317% di tahun 2023 dari 102% di tahun 2022. Indikator lainnya yang mengalami peningkatan adalah indeks reformasi birokrasi dengan capaian 108% pada tahun 2023 dari capaian 90% di tahun 2022. Persentase PPKS yang mandiri juga mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023 sebesar 239% dari 109% di tahun 2022. Selain itu indeks risiko bencana juga mengalami capaian yang sangat baik di tahun 2023 sebesar 110% dari 96,7% di tahun 2022.

Salah satu indikator dengan capaian tertinggi adalah Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan yang mengalami peningkatan sebesar 214% yaitu dengan capaian 317% pada tahun 2023 dari 103% pada tahun 2022. Hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya peningkatan akses dan

daya tarik destinasi pariwisata yang di Kabupaten Pangandaran sangat berhasil sehingga menjadi daya tarik wisatawan. Persentase PPKS yang mandiri juga mengalami pencapaian yang sangat baik hingga 132%, hal ini menunjukan bahwa perlahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat teratasi dengan baik.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMD dilakukan untuk mengetahui pergerakan nilai capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2023 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 .43 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan target Akhir RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	81,94	64,00	128%
2.	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	0,4975	0,3048	163%
3.	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase	59,7	90	66%
4.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8413	0,7770	108%
5.	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	Persentase	62	60	103%
6.	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	1.998.592,23	750.000	266%
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,57	70,53-71,00	99%
8.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,2	90,16-90,20	100%
9.	Indeks Kesehatan	Indeks	84,43	81,40-81,50	104%
10.	Indeks Pendidikan	Indeks	60,97	60,71-61,00	100%
11.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19,62	20,24	97%
12.	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah	50	130	38%
13.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,67%	0,70-0,71	94%
14.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	76,09	75,98%	100%
15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,26	6,21-6,60	80%

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
16.	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	8,98	4,50-5,57	161%
17.	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	-	5,520	-
18.	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase	-13,59	8,38	-162%
19.	Rasio Kewirausahaan	Rasio	24,39	4,50	542%
20.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,57	81,12	103%
21.	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	88,26	75	118%
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	1,52	4,60-3,50	43%
23.	Persentase PPKS yang Mandiri	Persentase	112,14	40.63	276%
24.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (73,72)	79-84	88%
25.	Nilai SAKIP	Nilai	B (67,99)	81,25-85,00	80%
26.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
27.	Indeks SPBE	Indeks	3,53	3,25	109%
28.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	75.00	-
29.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55,89	56,42	99%
30.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,07	3,06-3,15	129%
31.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	-	80,00	-
32.	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,731	1,865	93%
33.	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persentase	54,98	54,64	101%
34.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	147,85	135	110%
35.	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	137,36	136,44	101%
36.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,44	66,43	97%

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 20 Indikator yang realisasinya sudah mencapai target akhir RPJMD, seperti Indeks Kesalehan Sosial, Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani, Indeks Desa Membangun, Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata, Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, Indeks Pemberdayaan Gender, Persentase Penduduk Miskin, Rasio Kewirausahaan, Indeks Ketahanan Pangan, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase PPKS

yang Mandiri, Tingkat Maturitas SPIP, Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, Persentase cakupan layanan infrastruktur, Indeks Risiko Bencana, dan Indeks Kapasitas Daerah. Kemudian terdapat 9 indikator utama yang sudah sangat mendekati target akhir RPJMD, karena capaian dari 6 indikator ini sudah lebih dari 90%. Sedangkan, untuk 7 indikator lainnya belum mencapai target akhir RPJMD, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD selanjutnya dapat tercapai.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 .44 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Provinsi/ Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pangandaran	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Realisasi Nasional
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	81,94	-	-
2.	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	0,4975	-	-
3.	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase	59,7	-	-
4.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8413	-	-
5.	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	Persentase	62	-	-
6.	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	1.998.592,23	-	-
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,57	72,45	72,3
8.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,2	-	-
9.	Indeks Kesehatan	Indeks	84,43	-	-
10.	Indeks Pendidikan	Indeks	60,97	-	-
11.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19,62	-	-
12.	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah	50	-	-
13.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,67%	1,41%	1,22%
14.	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	76,09	89,36	91,27
15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,26	-	-
16.	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	8,98	-	-
17.	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	Nilai belum rilis	-	-
18.	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase	-13,59	-	-
19.	Rasio Kewirausahaan	Rasio	24,39	-	-
20.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,57	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pangandaran	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Realisasi Nasional
21.	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	88,26	-	-
22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	1,52	9,82%	6,5%
23.	Persentase PPKS yang Mandiri	Persentase	112,14	-	-
24.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (73,72)	A (93,08)	76,81
25.	Nilai SAKIP	Nilai	67,99	-	-
26.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	-	-
27.	Indeks SPBE	Indeks	3,53	-	-
28.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Nilai belum rilis	-	-
29.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55,89	-	-
30.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,07	-	-
31.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	Nilai belum rilis	-	-
32.	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,731	-	-
33.	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persentase	54,98	-	-
34.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	147,85	145,81	-
35.	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	137,36	-	-
36.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,44	61,59	71,43

Sumber data: Statistik Indonesia, dan Jawa Barat Dalam Angka, Pangandaran Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, yakni perbandingan antara realisasi Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dan Nasional diketahui bahwa capaian rata-rata pada setiap Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran terlihat lebih baik dibandingkan capaian indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat. Begitupun dengan Indikator Kinerja Utama Nasional, dimana capaian Indikator Kinerja Utama Nasional lebih rendah dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Provinsi. Akan tetapi masih terdapat data Indikator capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional masih belum diketahui karena belum adanya publikasi.

3.2.5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3 .44 Capaian Anggaran Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Anggaran 2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
T.1 Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	22.021.380.027	17.061.584.862	77,48%
S.1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	17.726.767.476	13.754.222.763	77,59%
S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	4.294.612.551	3.307.362.099	77,01%
T.2 Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	8.229.457.010	5.727.424.779	69,60%
S.3 Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	8.229.457.010	5.727.424.779	69,60%
T.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	498.617.564.783	201.859.364.747	40,49%
S.4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	268.586.191.890	183.649.038.349	68,38%
S.5 Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	222.748.464.153	11.408.695.682	5,12%
S.6 Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	6.355.217.020	6.086.839.598	95,78%
S.7 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	927.691.720	714.791.118	77,05%
T.4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	73.971.708.258	38.657.653.089	52,26%
S.8 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	12.502.133.166	5.890.661.209	47,20%
S.9 Meningkatnya permukiman layak huni	53.109.724.290	26.748.189.425	50,36%
S.10 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	1.808.049.961	1.249.531.015	69,11%

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Anggaran 2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
S.11 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	6.551.800.841	4.769.271.440	72,79%
T.5 Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	5.716.271.297	3.173.155.574	55,51%
S.12 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	5.298.641.297	2.977.540.851	56,19%
S.13 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	417.630.000	195.614.723	46,84%
T.6 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	372.034.109.402	233.074.297.345	62,65%
S.14 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	354.936.373.699	221.726.316.688	62,47%
S.15 Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	10.977.450.948	7.774.195.875	70,82%
S.16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	6.120.284.755	3.573.784.782	58,39%

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa capaian anggaran tahun 2023 mencapai 50,95%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 499.553.480.396 dari total anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 980.590.490.777. Secara rinci, pada tujuan 1 capaian anggarannya mencapai 7748%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.17.061.584.862 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 22.021.380.027. Pada tujuan 2, capaian anggarannya adalah sebesar 69,60%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 5.727.424.779 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 8.229.457.010. Pada tujuan 3, capaian anggarannya adalah sebesar 40,48%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.201.859.364.747 dari jumlah anggaran sebesar Rp.498.617.564.783. Pada tujuan 4, capaian anggarannya adalah sebesar 52,26%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 38.657.653.089 dari jumlah anggaran sebesar 73.971.708.258.

Pada tujuan 5, capaian anggarannya adalah sebesar 55,51%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.3.173.155.574 dari jumlah anggaran sebesar Rp.5.716.271.297. Pada tujuan 6, capaian anggarannya adalah sebesar 62,65%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.233.074.297.345 dari jumlah anggaran sebesar Rp.372.034.109.402.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran

Analisis data efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 .45 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2023 (%)	Efisiensi	Efisien/ Tidak Efisien
T.1 Memperkuat Nilai-Nilai Karakter Bangsa Berbasis Nilai Luhur dan Budaya Lokal.	134%	77,48%	56,52%	EFISIEN
S.1 Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	248%	77,59%	170,41%	EFISIEN
S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	109%	77,01%	31,99%	EFISIEN
T.2 Terwujudnya Pengelolaan Pariwisata yang Efektif dan Efisien yang Menjunjung Nilai-Nilai Kearifan Lokal	207%	69,60%	137,40%	EFISIEN
S.3 Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	317%	69,60%	247,40%	EFISIEN
T.3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing.	100%	40,48%	59,52%	EFISIEN
S.4 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	103%	68,38%	31,62%	EFISIEN
S.5 Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	50%	5,12%	44,88%	EFISIEN
S.6 Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	92%	95,78%	-3,78%	TIDAK EFISIEN
S.7 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	102%	77,05%	24,95%	EFISIEN
T.4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat.	181%	52,26%	128,74%	EFISIEN
S.8 Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	133%	47,20%	85,80%	EFISIEN
S.9 Meningkatnya permukiman layak huni	119%	50,36%	68,64%	EFISIEN
S.10 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	280%	69,11%	210,89%	EFISIEN
S.11 Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	239%	72,79%	166,21%	EFISIEN
T.5Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	108%	55,51%	52,49%	EFISIEN
S.12 Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	86,92%	56,19%	30,73%	EFISIEN
S.13 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	148%	46,84%	101,16%	EFISIEN
T.6 Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana	Nilai belum rilis	62,65%	-	-
S.14 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	171%	62,47%	108,53%	EFISIEN

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2023 (%)	Efisiensi	Efisien/ Tidak Efisien
S.15 Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	149%	70,82%	78,18%	EFISIEN
S.16 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	98%	58,39%	39,61%	EFISIEN

Sumber: Bappeda, Sekretariat Daerah, Capaian IKU Kabupaten Pangandaran

BAB IV
PENUTUP

4.1 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pangandaran disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Pangandaran yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap Pencapaian Indikator, Sasaran Strategis, dan Capaian Misi. Penyusunan LKjIP juga merupakan sebuah pertanggungjawaban pencapaian Visi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran yaitu **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”** sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Visi tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 6 misi yakni :

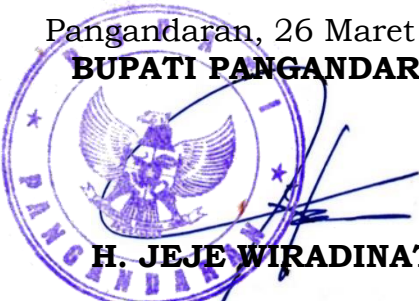
- Pertama** Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
- Kedua** Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan
- Ketiga** Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
- Keempat** Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal
- Kelima** Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
- Keenam** Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Realisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Demikian pula pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyusun RKPD yang berisi usulan strategi dan program/kegiatan dengan mengacu pada indikator dan target mengacu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja 36 Indikator Kinerja Utama (IKU) disimpulkan bahwa 30 Indikator atau sebesar 84% dari seluruh IKU memiliki capaian dengan kategori sangat Tinggi, indikator dengan kategori Sedang sebanyak 1 indikator atau sebesar 2,7% dan terdapat 2 indikator dengan capaian sangat rendah atau 5,6% dari total keseluruhan indikator. Selanjutnya masih terdapat 8,4% Indikator yang belum terdapat data dan capaiannya.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan terus selalu mengupayakan terjadinya percepatan pembangunan dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar target akhir RPJMD dapat tercapai. Dengan tercapainya target akhir di RPJMD nantinya, diharapkan dapat menjawab dan menuntaskan visi dan misi yang telah tertuang pada periode tersebut. Koordinasi dan sinkronisasi akan terus dilakukan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka menerapkan SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Selain itu, seluruh Perangkat Daerah harus dapat bersinergi dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pangandaran, 26 Maret 2024
BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 – 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Sumber Data/ Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	N/A	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	
Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	N/A	0,2250	0,2344	0,2344	0,2579	0,2814	0,3048	Satpol PP
	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase	N/A	77,25	80	82,5	85	87,5	90	Bakesbangpol
Meningkatnya pemberda-yaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7374	0,7251	0,7689	0,7691	0,7693	0,7696	0,7770	Dinsos PMD /Kemendesa PDTT
	Persentase pemenuhan indikator GSTC di destinasi pariwisata	Persentase	N/A	10	20	30	40	50	60	Disparbud
Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rupiah	N/A	600.000	630.000	660.000	690.000	720.000	750.000	Disparbud
	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,06	68,07-68,49	68,50-69,12	69,12-69,59	69,59-70,06	70,06-70,53	70,53-71,00	BPS
	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,78	89,72-89,90	89,91-89,98	89,99-90,05	90,06-90,09	90,10-90,15	90,16-90,20	BPS
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	Indeks	79,08	79,09-79,60	79,61-80,10	80,11-80,50	80,51-81,00	81,01-81,40	81,40-81,50	Dinkes/BPS
	Indeks Pendidikan	Indeks	59,33	59,34-59,50	59,51-59,90	59,61-60,20	60,21-60,50	60,51-60,70	60,71-61,00	Disdikpora/ BPS
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	16,37	17,85	18,56	19,16	19,61	19,95	20,24	Dispusip
Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan	Jumlah	N/A	100	100	100	110	120	130	Disdikpora
Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase	0,76	0,75-0,76	0,74-0,75	0,73-0,74	0,72-0,73	0,71-0,72	0,70-0,71	DKBP3A/ BPS
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,57	74,57	74,57	74,58	74,59	74,60	74,61	DKBP3A/ BPS
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	-0,05	3,30-4,50	4,60-5,20	5,21-5,50	5,51-5,90	5,91-6,20	6,21-6,60	BPS
	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	8,99	8,40-8,70	7,00-7,55	6,40-7,00	5,90-6,40	5,18-5,90	4,50-5,57	Dinsos PMD /BPS

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Sumber Data/ Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	Rupiah	4,597	4,825	4,667	4,923	5,109	5,310	5,520	GABUNGAN
	Persentase Realisasi Nilai Investasi	Persentase	6,57	6,35	6,89	7,24	7,60	7,98	8,38	DPMPTSP
	Rasio Kewirausahaan	Rasio	2,54	3,62	3,75	3,95	4,15	4,30	4,50	Disperindagkop UMKM
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81,99	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	DKPKP
Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	73	73	74	74	74	74	75	DPUTRPKP
Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	5,08	5,07 - 5,01	5,00- 4,50	4,90- 4,25	4,80- 4,00	4,70- 3,75	4,60- 3,50	Disnakertrans/BPS
Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	Persentase	27	30	37	47	57	67	77	Dinsos PMD
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	54-58	59-63	64-68	69-73	74-78	79-84	Setda/ Bag. Organisasi
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Nilai SAKIP	Nilai	B	66,90- 67,15	67,25- 69,00	69,25- 72,00	72,25- 76,00	76,25- 81,00	81,25- 85,00	Setda/ Bag. Organisasi (Kemenpan RB)
	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
	Indeks SPBE	Indeks	3,02	2,38	3,04	3,05	3,1	3,2	3,25	Diskominfo
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	BPKD
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	38,92	39,50	42,42	45,92	49,42	52,92	56,42	BKPSDM
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	2,50- 2,60	2,61- 2,65	2,66- 2,75	2,86- 2,95	2,96- 3,05	3,06- 3,15	Setda/ Bag. Organisasi
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	77,16	77,63	78,11	78,58	79,05	79,53	80,00	DPUTRPKP
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,635	1,654	1,731	1,788	1,808	1,846	1,865	Dishub
	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persentase	37,64	38,95	41,37	44,94	48,28	51,47	54,64	DPUTRPKP
Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	145	142	143	141	139	137	135	BPBD
	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	145,45	144,00	143,4	142,00	139,2	137,84	136,44	BPBD
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,22	65,32	65,54	65,76	65,98	66,20	66,43	DLHK



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
2024**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KABUPATEN PANGANDARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. JEJE WIRADINATA

Jabatan : BUPATI PANGANDARAN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangandaran, Januari 2024

BUPATI PANGANDARAN,



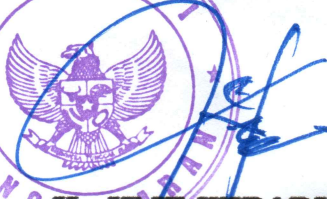
H. JEJE WIRADINATA

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Beriman Taqwa Dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragam			
1.	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,2579
		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	85
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,7693
Misi 2: Mengembangkan Wisata Dengan Memperluas Akses Dan Penataan Berkelanjutan			
2.	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	660.000
Misi 3: Mengembangkan Aksesibilitas Kesehatan Dan Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Serta Peningkatan Kompetensi Lulusan			
3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	80,68
		Indeks Pendidikan	60,33
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,61
	Meningkatkan Jumlah Pemuda berprestasi	Persentase pemuda yang mendapatkan penghargaan	40
	Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,57
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	74,59
Misi 4: Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal			
4.	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,109
		Persentase Realisasi Nilai Investasi	7,60
		Rasio Kewirausahaan	4,15
		Indeks Ketahanan Pangan	82,5
	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	74
	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80 - 4,00
	Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	57

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel			
5.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	73
		Tingkat Maturitas SPIP	3
		Indeks SPBE	3,1
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,00
		Indeks Profesionalitas ASN	49,42
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	2,86 – 2,95
Misi 6: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan			
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,808
		Persentase cakupan layanan infrastruktur	48,28
	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	139
		Indeks Kapasitas Daerah	139,2
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,98

Pangandaran, Januari 2024


BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	224.537.600
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.841.459.248
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	286.068.400
4	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.415.775.600
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.078.044.098
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.605.000
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	492.522.570
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	787.659.101
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	71.900.260
10	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	47.002.631
11	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	426.213.293
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	74.844.519
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.445.189.000
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	926.993.494
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.282.840
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	132.571.609
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	408.140.629
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	10.835.000
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	197.736.000
20	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.020.141.000
21	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	561.910.991
22	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	61.740.000
23	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.202.293.659
24	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.525.989.945
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	888.548.852
26	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	58.235.800
27	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.321.000
28	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.865.756.800
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	6.438.600.000
30	PROGRAM PENATAAN DESA	20.000.000
31	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	30.000.000
32	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	132.561.718
33	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	524.000.000
34	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	351.230.000
35	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	105.000.000
36	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	554.511.000
37	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	177.437.464
38	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	235.993.358
39	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	111.394.520
40	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	45.460.800
41	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	7.449.500

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
42	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.750.000
43	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	478.273.100
44	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	74.214.588
45	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.318.895.600
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.928.328.000
47	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.491.388.000
48	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	41.552.000
49	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75.423.674
50	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	659.114.748
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.048.925.507
52	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	251.397.936.971
53	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.197.187.122
54	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.726.264.989
55	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.682.073.667
56	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	875.658.847
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.246.879.134
58	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.783.751.000
59	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	18.350.000
60	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	83.358.347
61	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	312.690.240
62	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	26.775.400
63	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	119.438.000
64	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.822.420.781
65	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	840.611.698
66	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	441.634.000
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	987.999.411
68	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100.000.000
69	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	169.274.734
70	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	50.049.000
71	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	12.008.849
72	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	61.000.000
73	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	159.999.900
74	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	670.830.382
75	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	52.074.000
76	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	424.150.000
77	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	30.000.000
78	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	679.755.000
79	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	630.387.988
80	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.168.597.300
81	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	77.651.667
82	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	722.400.000
83	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.256.392.533

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
84	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	560.865.056
85	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	180.000.000
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	19.319.695.740
87	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	40.983.000
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	674.273.690
89	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.203.426.710
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	286.133.830.816
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.783.682.854
92	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	444.000.000
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	34.800.000
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.010.000.000
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	76.712.000
96	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	118.529.150
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	112.521.325
98	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	60.000.000
99	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	555.000.000
100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.180.297.900
101	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	646.184.000
102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	441.735.000
103	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	88.474.370
104	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.539.898.530
105	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	33.100.000
106	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.451.268.800
107	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	39.860.044
108	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	21.290.380
109	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	835.000.000
110	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	24.280.000
111	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.702.490.000
112	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	200.000.000
113	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	52.534.400
114	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	34.966.987

Pangandaran, Januari 2024

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**